

BAB I

PENDAHULUAN UMUM

1.1 Latar Belakang

Dinamisasi industri pariwisata yang saat ini cenderung mengikuti perkembangan global dinilai dapat mempengaruhi pembangunan Indonesia, dimana terlihat dari kecenderungan wisatawan berkunjung yang tadinya *mass tourism* saat ini menjadi *new global tourism* (Harofah & Mutaqin, 2023) Kondisi pariwisata melalui *Branding Wonderful Indonesia* pada tahun 2017 juga semakin meningkat, yaitu dari tahun 2013 dengan peringkat 70 pada tahun 2015 menjadi peringkat 50 sampai pada tahun 2017 naik menjadi peringkat 42 (Hilyatin, D. L., & Hanifah, 2020). Dalam hal ini Pariwisata berkelanjutan menjadi salah satu fokus pengembangan wisata yang dilakukan Kemenparekraf selain pengembangan pariwisata yang berkualitas (Kemenparekraf, 2022). Pariwisata berkelanjutan didefinisikan oleh UNWTO sebagai kegiatan wisata yang memperhitungkan penuh dampak saat ini dan masa depan ekonomi, sosial serta lingkungan, menyikapi kebutuhan wisatawan, industri pariwisata, lingkungan dan masyarakat lokal. UNWTO menyatakan bahwa pariwisata berkelanjutan merupakan pariwisata yang mengacu pada aspek lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya dari pengembangan pariwisata (UNWTO, 2021). Prinsip utama dalam *sustainable tourism* adalah *environmental sustainability*, *social sustainability* dan *economic sustainability* (Rozi, 2023). Isu lingkungan mencakup *waste manajement*, *rethinking of travel model* dan *respect the animals*. Sedangkan untuk sosial dan ekonomi *sustainability* dapat dijalankan melalui *support local business*, *eat locally* dan *respect their local and custom*.

Pariwisata telah menjadi salah satu sektor ekonomi penting bagi banyak negara di seluruh dunia. Sektor ini tidak hanya dapat meningkatkan ekonomi, tetapi juga dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat komunitas. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2015. Sebuah agenda pembangunan global, atau SDGs, adalah pendekatan pembangunan yang disepakati secara internasional. SDGs terdiri dari 17 tujuan diantaranya untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi Bumi, dan memastikan bahwa semua orang pada tahun 2030 dapat hidup dalam kedamaian dan kemakmuran, sambil mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, SDG terdiri dari tiga komponen utama yaitu pembangunan manusia, pembangunan sosial ekonomi, dan pembangunan lingkungan (Pranoto et al., 2023).



Gambar 1.1 Sustainable Development Goals

Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2017 mengatur pelaksanaan SDGs dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, pembangunan inklusif, dan penerapan tata kelola yang mampu meningkatkan kualitas hidup dari generasi ke generasi (Nurbadiyah, 2024). Pembangunan pada bidang kepariwisataan dilakukan dengan melihat kemampuan untuk mendorong peningkatan kehidupan ekonomi, sosial budaya dan pandangan dari nilai – nilai hidup di masyarakat. Tentunya yang harus di perhatikan juga adanya aspek kelestarian budaya serta mutu lingkungan hidup melalui keberlangsungan usaha pariwisata. Pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik di ukur dengan kesejahteraan yang dirasakan masyarakatnya. Hal ini juga sejalan dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang mengamanatkan bahwa pengembangan pariwisata harus

berbasis keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian lingkungan dan budaya.

Sumber daya kelautan Indonesia juga sangat kaya sebab memiliki kawasan perairan terluas dunia. Hingga tahun 2016 telah dicapai kawasan konservasi perairan seluas 17,9 juta hektar yang terdiri atas 165 marine protected area (MPA) dari target 20 juta hektar tahun 2020. Indonesia juga fokus mengelola MPA guna memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan ekonomi kawasan-kawasan konservasi tersebut dilakukan melalui kegiatan perikanan tangkap, budidaya, pariwisata bahari, dan penelitian serta pendidikan. Indonesia juga secara tegas memberantas aktivitas perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan dan tidak diatur (Bappenas, 2017).

Hal ini memberi perhatian pada “Sumber Pendapatan Baru” dari perekonomian yang saat ini sudah mulai dilakukan dan potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Sumber pendapatan baru yang pertama adalah pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini merupakan sektor/sumber pendapatan baru perekonomian yang tidak bersifat eksploitatif terhadap sumber daya alam, sehingga lebih ramah lingkungan hijau dan berkelanjutan. Sumber ekonomi baru ini tidak hanya mengandalkan pada pengetahuan dan keterampilan, namun juga kekayaan keanekaragaman budaya (kuliner, kerajinan, budaya khas atau tradisional dsb). Indonesia banyak memiliki kekayaan dan talenta di bidang ini, kaya akan aset budaya, suatu potensi untuk terus dikembangkan. (Alisjahbana, 2021).

Bidang pariwisata yang memiliki potensi pemanfaatan sumber daya alam dan daya tarik untuk berbagai pihak dalam membuat regulasi adalah kawasan pesisir seperti pariwisata bahari maupun pantai (Dewi et al., 2023). Salah satu jenis pariwisata yang dapat dijadikan aset berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia adalah wisata bahari. Wisata bahari adalah aktivitas wisata alam dan berlangsung di laut atau wilayah pesisir seperti wisata bawah laut, bentang laut, dan pantai serta memiliki potensi dari daya tarik yang berasal dari perikanan maupun jasa sumber daya laut yang dimanfaatkan (Rijal, 2023).

Selain itu, keunggulan wisata bahari yaitu sumber daya buatan, melimpahnya sumber daya hayati dan nonhayati, sumber daya non konvensional, dan pelayanan lingkungan. Sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang berkaitan dengan perikanan dan kelautan. Sumber daya

hayati meliputi terumbu karang, ikan, mangrove, padang lamun, dan biota laut yang lain. Sumber daya non hayati meliputi air laut, pasir, dan mineral dasar laut. Sumber dsaya non konvensional meliputi sumber daya alam yang pemanfaatannya belum dilakukan secara optimal. Selain itu terdapat jasa-jasa lingkungan laut seperti energi gelombang laut, keindahan alam, dan permukaan dasar laut yang berkaitan dengan perikanan dan kelautan (Rasman, 2021).

Dalam Perda Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012-2033, Kabupaten Banggai termasuk dalam kawasan peruntukan pariwisata dikarenakan memiliki potensi pariwisata yang cukup beragam, diantaranya wisata alam dan wisata buatan. Perda No 2 tahun 2023 tentang penyelenggaraan kepariwisataan Kab. Banggai yang meliputi penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pengawasan dengan wajib memperhatikan kearifan lokal yang bersumber dari nilai adat BABASALAN masyarakat setempat, perlindungan lingkungan alam dan budaya, pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat, pemenuhan standar K3 dan usaha pariwisata berkelanjutan. Dalam Perda No 10 tahun 2021 termuat dalam visi pembangunan kepariwisataan daerah yaitu terwujudnya Banggai sebagai kota jasa pariwisata berbasis kearifan lokal dan budaya yang berdaya saing.

Tabel 1. 1 Data Kunjungan Wisatawan Kab.Banggai

Indikator	2019	2020	2021	Satuan Data
Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik	25.933	21.682	24.113	Orang
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	38	22	-	Orang
Jumlah Kunjungan Wisata yang direncanakan se-Kabupaten dan Kota	50.885	24.494	35.754	Pengunjung
Rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun	25.971	21.074	24.133	Pengunjung

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai

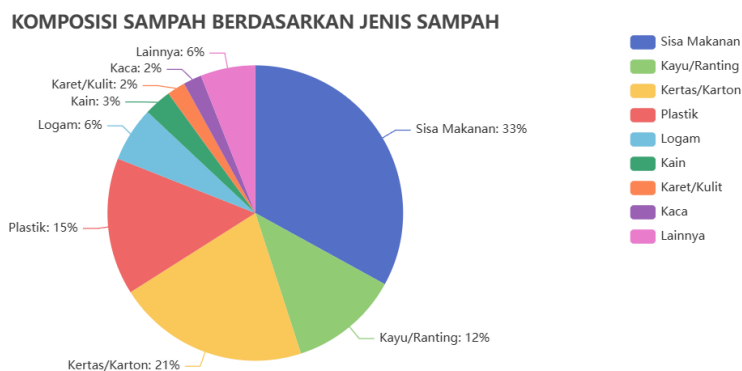
Data pada table 1.1 menunjukkan adanya penurunan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas wisatawan secara global (UNWTO, 2021). Namun,

pada tahun 2021 terjadi peningkatan kembali jumlah wisatawan domestik dari 21.682 menjadi 24.113 orang. Peningkatan ini mengindikasikan pemulihan sektor pariwisata yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan wisata bahari di Pulau Dua dengan pendekatan keberlanjutan. Meskipun terjadi pemulihan jumlah wisatawan, tantangan utama dalam pengembangan wisata bahari di Pulau Dua adalah keterbatasan sarana prasarana seperti akomodasi, air bersih, dan listrik. Data menunjukkan bahwa rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun juga mengalami fluktuasi, dari 25.971 pengunjung di 2019 menurun menjadi 21.074 di 2020, kemudian meningkat ke 24.133 di 2021. Hal ini menunjukkan bahwa destinasi masih memiliki daya tarik tetapi memerlukan peningkatan fasilitas untuk menjaga stabilitas kunjungan wisatawan. Menurut penelitian (Scott D.dkk, 2019), pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, termasuk energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya air, merupakan kunci dalam membangun destinasi wisata berbasis SDGs.

Selain permasalahan dari kegiatan kunjungan wisatawan di Pulau Dua akibat pandemi covid-19 dan berkurangnya wisatawan, terdapat permasalahan mengenai menurunnya daya dukung lingkungan. Meskipun Pulau Dua memiliki lahan luas tetapi pemanfaatannya belum dilakukan secara maksimal seperti terlihat pantai yang kotor karena sampah berserakan dimana-mana bahkan terbawa ombak, warung atau kios yang tidak tertata rapi, penataan lahan parkir yang belum teratur, tidak tersedianya banyak tempat sampah, serta kurangnya kesadaran dari wisatawan dan para pelaku ekonomi dalam menjaga kebersihan pantai sehingga laut menjadi tercemar. Hal ini apabila diabaikan dapat membuat citra dari Pulau Dua menurun sehingga banyak wisatawan yang tertarik dengan keindahan Pantai tetapi kecewa dengan kebersihan lingkungannya (Rahmawati, 2022).

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Gambar 1.2 menunjukkan bahwa komposisi sampah di Kabupaten Banggai pada tahun 2023 didominasi oleh sisa makanan (33%), kayu/ranting (12%), kertas/karton (21%), dan plastik (15%). Sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari laut, mengancam biota laut, dan menurunkan daya tarik wisata bahari. Wisatawan cenderung memilih destinasi dengan lingkungan yang bersih dan terjaga, karena itu pengelolaan sampah yang buruk dapat berdampak negatif pada jumlah kunjungan wisatawan (Herdiansyah et al.,

2021). Strategi pengelolaan sampah yang efektif sangat penting dalam pengembangan wisata bahari berbasis keberlanjutan di Pulau Dua.



Gambar 1. 2 Komposisi Sampah Laut Kabupaten Banggai Tahun 2024

Sumber : (KLHK,2024)

Dalam hal ini wisata bahari memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan di berbagai wilayah pesisir. Sebagai salah satu sektor pariwisata yang berbasis pada potensi alam, wisata bahari tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi, tetapi juga mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Pulau Dua, yang terletak di Kabupaten Banggai, merupakan salah satu destinasi wisata bahari potensial yang menawarkan keindahan alam bawah laut serta pemandangan pantai yang memikat. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan yang selaras dengan prinsip *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Pengembangan wisata bahari di Pulau Dua, Luwuk Banggai, harus sejalan dengan kerangka hukum nasional yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menggarisbawahi bahwa pengembangan wisata bahari harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya laut dan kegiatan di wilayah laut harus sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Untuk implementasi yang lebih spesifik, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari memberikan pedoman bagi pengembangan desa wisata bahari dengan memanfaatkan potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan.

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan wisata bahari di Pulau Dua yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang tidak memadai, meskipun kunjungan wisatawan domestik mulai pulih pasca pandemi dalam hal ini dari segi fasilitas dasar seperti akomodasi, toilet umum, tempat pengumpulan sampah masih sangat minim. Sehingga, wisatawan yang berkunjung seringkali mengalami kesulitan dalam menemukan penginapan yang layak dan sesuai dengan standar kenyamanan. Hal ini tidak hanya mengurangi daya tarik destinasi, tetapi juga berdampak pada rendahnya kunjungan wisatawan jangka panjang. Keterbatasan sarana dan prasarana ini mencerminkan kurangnya perhatian dari pemerintah setempat terhadap perencanaan destinasi wisata yang strategis dan terintegrasi.

Keterbatasan air bersih di Pulau Dua juga menjadi isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian serius. Air bersih adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk mendukung aktivitas wisatawan dan masyarakat lokal. Namun, minimnya sarana yang memadai untuk penyediaan air bersih menyebabkan masalah sanitasi dan kenyamanan bagi para pengunjung. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang terarah untuk memastikan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di destinasi wisata bahari.

Selain itu, aksesibilitas merupakan salah satu komponen vital dalam pengembangan destinasi wisata. (Cooper et al, 2008) menjelaskan bahwa keberadaan infrastruktur transportasi yang memadai akan memengaruhi daya saing destinasi, kenyamanan perjalanan wisatawan, serta keterhubungan antarkomponen pariwisata. Di Pulau Dua, keterbatasan jalan penghubung, minimnya fasilitas dermaga, dan kondisi jalur transportasi yang rusak atau tidak terpelihara dengan baik, menjadi faktor yang menghambat laju kunjungan

wisatawan. Kondisi ini juga berimplikasi pada tingginya biaya logistik, rendahnya akses masyarakat terhadap peluang ekonomi, serta terbatasnya pengembangan usaha wisata berbasis komunitas. Tentunya hal ini harus sejalan dengan konsep pariwisata berkelanjutan yang dikemukakan oleh Jost Krippendorf, dimana menemukan adanya berbagai efek negatif yang ditimbulkan oleh pariwisata. Ia lalu menawarkan solusi alternatif untuk pariwisata yang lebih ramah terhadap lingkungan. Pada akhir tahun 1980-an, ia menyatakan bahwa gagasan pariwisata berkelanjutan mulai menarik perhatian di kalangan akademisi. Kondisi global yang terkena dampak pandemi selama hampir dua tahun mempercepat munculnya pemikiran tentang konsep pariwisata yang lebih ramah lingkungan. Di Indonesia, konsep pariwisata berkelanjutan mulai berkembang pada awal dekade 1990an (Asmoro et al, 2022).

Peran masyarakat lokal dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata di Pulau Dua juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Sebagai pengelola dalam mengembangkan destinasi, masyarakat lokal dapat berkontribusi dalam berbagai bentuk, mulai dari penyediaan jasa hingga pelestarian lingkungan. Namun, rendahnya kesadaran masyarakat seringkali disebabkan oleh kurangnya edukasi dan pelatihan terkait manajemen pariwisata. Upaya pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang memadai dan berkelanjutan.

Di sisi lain, promosi wisata bahari Pulau Dua belum mampu menjangkau akses pasar global dalam menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Hal tersebut menjadi salah satu faktor permasalahan yang perlu di atasi, dalam hal ini, Potensi keindahan alam Pulau Dua belum terekspos secara maksimal melalui media promosi yang efektif. Kondisi ini membuat wisata bahari Pulau Dua kurang dikenal, luas baik di tingkat nasional maupun internasional. Strategi pemasaran yang memadai dan peningkatan teknologi, dapat menarik perhatian pengunjung wisatawan lokal dan mancanegara dalam mendapatkan informasi mengenai wisata bahari di pulau dua menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan daya tarik destinasi ini.

Pengambilan keputusan untuk pariwisata yang berkelanjutan memerlukan partisipasi dari masyarakat serta pihak-pihak berkepentingan setempat untuk mencapai keseimbangan. Dengan pendekatan yang terpadu, pariwisata di pulau

dua bisa dikembangkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekologi, sosial, dan ekonomi. Ini akan menghasilkan keuntungan maksimal bagi masyarakat kota dan lokal serta keberlangsungan lingkungan (Achmad et al. , 2024). Pertumbuhan yang cepat di kawasan pesisir serta peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan perubahan fungsi lahan di Pulau Dua (Rondonuwu et al. , 2020).

Berdasarkan permasalahan yang di uraikan tentang kurangnya tata kelola sarana dan prasarana wisata bahari yang terarah pada pengembangan pariwisata berkelanjutan, ditengah upaya pemerintah untuk mendorong pariwisata berkelanjutan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) saat ini tidak fokus mengejar angka kunjungan wisatawan di Indonesia saja, tapi lebih berfokus pada usaha mendorong pariwisata berkelanjutan atau *sustainable tourism* di Indonesia (Kemenparekraf/ Baparekraf RI, 2022).

Sehingganya penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pariwisata berbasis SDGs dalam pengembangan wisata bahari di Pulau Dua. Pendekatan yang digunakan akan mengintegrasikan analisis kondisi eksisting di wilayah wisata pulau dua dengan potensi pengembangan jangka panjang yang melibatkan pemerintah daerah setempat, pelaku industri pariwisata dan masyarakat lokal. Dalam hal ini peneliti berharap dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam mendorong Pulau Dua menjadi destinasi wisata bahari unggulan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam konteks SDGs, pariwisata berkelanjutan memiliki peran strategis dalam menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, belum maksimalnya implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan pada pengelolaan wisata bahari di Pulau Dua Kab. Banggai berpotensi mengancam kelestarian lingkungan pesisir serta mengurangi daya tarik wisatawan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan wisata bahari berbasis SDGs yang tidak hanya mampu meningkatkan daya saing Kabupaten Banggai, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.

Berdasarkan pernyataan masalah di atas, maka diajukan rumusan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi wisata bahari di Pulau Dua Kab. Banggai saat ini kaitannya dengan pencapaian *sustainable development goals* (SDGs)?
2. Strategi apa yang sebaiknya digunakan dalam pengembangan wisata bahari di Pulau Dua Kab. Banggai yang mengintegrasikan pencapaian *sustainable development goals* (SDGs)?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka dapat di kemukakan tujuan penelitian yaitu :

1. Menganalisis kondisi wisata bahari di Pulau Dua Kab. Banggai dalam pencapaian *sustainable development goals* (SDGs)
2. Mengusulkan strategi di Pulau Dua Kab. Banggai yang mengintegrasikan pencapaian *sustainable development goals* (SDGs)

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan berguna sebagai :

1. Bagi ranah Ilmu Perencanaan dan Pengembangan Wilayah bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan kegiatan penelitian serupa atau pada lokasi penelitian yang sama.
2. Bagi praktisi perencanaan bermanfaat sebagai sarana pengembangan terhadap kajian wisata bahari berbasis pariwisata berkelanjutan.
3. Bagi pembuat kebijakan (pemerintah) bermanfaat sebagai informasi dan landasan pertimbangan dalam proses pengembangan wisata di Kab. Banggai.

1.5 Batasan Penelitian

1. Ruang lingkup kawasan penelitian yang akan dibahas adalah di Kecamatan Balantak Utara Pulau Dua, Kabupaten Banggai. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2021-2025, pasal 38 (2) Pulau Dua Kecamatan Balantak Utara telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Daerah wisata bahari utara yang terletak di Desa Pulau Dua.
2. Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan tiga aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.

3. Pengukuran wisata bahari berdasarkan atas tujuan pariwisata berkelanjutan yang termuat dalam SDGs.
4. Penyusunan strategi pengembangan kawasan wisata bahari Pulau dua dengan analisis SWOT.

1.6 Kebaruan Penelitian

Penelitian terkait strategi pengembangan wisata bahari sudah banyak dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan menggunakan berbagai macam metode yang memiliki ciri khas tersendiri. Banyak juga yang menggabungkan kedua metode yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Kebaruan penelitian yang mengkaji tentang strategi yang dilakukan berdasarkan pariwisata berkelanjutan dalam proses pengembangan wisata bahari sebagai kawasan unggulan di Kabupaten Banggai melalui program kerja Pemerintah Kabupaten Banggai meneliti aspek-aspek baru yang mampu mengembangkan potensi wisata bahari Pulau Dua.

Penelitian sejenis yang mengkaji tentang strategi pengembangan wisata bahari yang telah banyak dilakukan. Hal baru yang menjadi aspek yang berbeda dari penelitian ini adalah: (1) Penelitian tentang strategi pengembangan wisata bahari pulau dua berbasis keberlanjutan yang mengintegrasikan pencapaian SDGs belum secara langsung di implementasikan pada wisata pulau dua, (2) Penelitian dengan pendekatan konsep SDGs di Kabupaten Banggai belum terinci penerapannya, (3) Variabel yang diduga berpengaruh terhadap strategi pengembangan berbasis SDGs akan berbeda antara satu destinasi dengan destinasi pariwisata lainnya. Untuk melihat secara jelas perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sejenis yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Perbedaan
1.	(Taghulih & Nuria, 2020)	Strategi Pengembangan Wisata Bahari Kabupaten Morotai Provinsi Maluku Utara	Meneliti tentang strategi pengembangan yang harus dilakukan dalam perumusan program pariwisata bahari di pulau morotai oleh pemerintah maupun stakeholder terkait	metode penelitian kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian menggunakan analisis teknik deskriptif kualitatif dan SWOT	Strategi pengembangan KPM dari analisis internal dan eksternal adalah tumbuh dan bina melalui konsentrasi integrasi vertikal yaitu mengintegrasikan aktivitas hulu dan aktivitas hilir. Untuk pihak pemerintah lebih meningkatkan sarana dan prasarana pada daerah tujuan wisata. Pembangunan diprioritaskan pada jaringan jalan, sarana transportasi, perhotelan dan biro perjalanan, meningkatkan promosi pariwisata melalui kerjasama	Penelitian yang akan dilakukan sama menggunakan Teknik analisis swot dengan memuat identifikasi dari hasil penyelerasan indikator SDGs dengan kondisi aktual. Perbedaannya terdapat pada konteks wilayah yakni pulau dua merupakan pulau kecil dengan ekosistem laut yang rentan. keterbatasan aksesibilitas, kesadaran lingkungan rendah, dan belum terkelola berbasis keberlanjutan. Adapun luaran dari penelitian yang akan dilakukan yaitu menghasilkan

					<p>dengan biro perjalanan dan lembaga – lembaga pemerintahan dalam negeri dan luar negeri, meningkatkan pembinaan terhadap tenaga – tenaga pramuwisata dan pelaku pariwisata melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam semua aspek kepariwisataan. Untuk pihak swasta perlu melakukan promosi kepada wisatawan tentang potensi objek wisata bahari di KPM, membuat dan menjual paket wisata KPM dengan menawarkan potensi – potensi wisata di KPM khususnya</p>	<p>strategi pengembangan yang selaras dengan tujuan pembangunan global.</p>
--	--	--	--	--	---	---

					wisata bahari baik melalui internet, brosur dll. Masyarakat harus menjaga dan memelihara sumber daya alam dan budaya serta untuk akademisi memiliki keterbatasan hanya sampai pada perencanaan yang fokus pada pengembangan produk	
2.	(Hayati et al., 2023)	Pengembangan Produk Berbasis Pariwisata Laut untuk Mendukung SDGs	menilai kelayakan produk yang ditawarkan berbasis pariwisata laut serta mengetahui peningkatan respons siswa terhadap penggunaan produk berbasis pariwisata laut pada Kabupaten Sumenep	menggunakan jenis penelitian pengembangan model ADDIE beserta Teknik pengumpulan data yaitu observasi dan angket.	Majalah elektronik sebagai produk berbasis pariwisata laut layak digunakan untuk media informasi yang mendukung SDGs. Rata-rata nilai validasi media dan materi yaitu 0,81 dan 0,86 dengan kategori valid.	Perbedaan yang terdapat pada penelitian yang akan dilakukan yaitu Fokus pada pengembangan wisata bahari dengan pendekatan berbasis Sustainable Development Goals (SDGs), mencakup aspek lingkungan (ekologi),

					<p>Rata-rata hasil respons siswa terhadap majalah elektronik sebagai produk berbasis pariwisata laut yaitu sebesar 77% dengan kategori baik. Majalah elektronik sebagai produk berbasis pariwisata diharapkan efektif untuk mendukung proses pendidikan, menyebarkan informasi tentang isu-isu lingkungan laut di kalangan wisatawan dan masyarakat lokal, serta mempromosikan praktik berkelanjutan.</p>	<p>sosial, dan ekonomi secara seimbang dan berkelanjutan. Tujuannya tidak hanya mengevaluasi kondisi eksisting, tapi juga merancang strategi pembangunan yang selaras dengan target pembangunan global</p>
3.	(Qamari1 & Primus Gadu2 &	Strategi Pengembangan Wisata	mengetahui potensi wisata yang	pendekatan penelitian deskriptif	strategi utama dalam mengembang	Luaran penelitian diharapkan

	Ander Sriwi, 2024)	Bahari Di Pulau Kenawa Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat	dimiliki serta strategi pengembangan Pulau Kenawa	kualitatif dengan menggunakan analisis SWOT	kan Kawasan wisata dengan cara menjaga sumber daya keanekaragaman hayati dan biota laut yang dimiliki Pulau Kenawa, mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana obyek wisata, dan mengembangkan Wisata Bukit Kenawa dan padang savanna dengan cara mengenalkan atau mempromosikan wisata Pulau Kenawa kepada para wisatawan	berbentuk strategi implementatif untuk pengembangan wisata bahari secara berkelanjutan dan inklusif, serta dapat direkomendasikan untuk kebijakan daerah yang sejalan dengan SDGs.
4.	(A. M. ARAFANDI, 2020)	Analisis Pengembangan Wisata Pantai Di Kabupaten Sinjai: Studi Kasus Pantai Hubat dan	Mengkaji permasalahan dan pengembangan wisata pantai di Kabupaten Sinjai	metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus tunggal holistik	pantai hubat dan bulokkong masih terdapat permasalahan dimana sumber daya buatan yang dikelola oleh	Perbedaan penelitian yang akan dilakukan yakni peneliti melakukan pendekatan strategis yang berorientasi pada

		Pantai Bulokkong			<p>pemerintah desa dan organisasi manajemen destinasi yang tidak berjalan secara efektif. Serta sumber daya manusia belum memadai juga pemasaran destinasi wisata yang belum mencakup secara nasional. Dalam hal ini peneliti melakukan pengembangan wisata pantai melalui kolaborasi dengan kelompok industri lain yang berafiliasi dengan pariwisata sehingga tercapainya peningkatan dari permasalahan yang ada.</p>	<p>perencanaan jangka panjang, berdasarkan indikator SDGs dengan metode analisis SWOT.</p>
5.	(Pillo et al., 2021)	<i>Integrated Sustainable Ecotourism</i>	Menganalisis fasilitas terkait	Pendekatan kuantitatif dan kualitatif	Penelitian ini menekankan pendekatan	Adapun gap dalam penelitian ini

		<p><i>Development Plan Through a Community-Based Approach for Bago City and Pulpandan</i></p>	<p>pariwisata dan partisipasi masyarakat setempat. Mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk keberlanjutan.</p>	<p>yang digunakan untuk analisis. Perlakuan statistik deskriptif, diskusi kelompok fokus, survei, dan wawancara.</p>	<p>berbasis masyarakat terhadap ekowisata berkelanjutan, menyoroti pentingnya partisipasi lokal dan kolaborasi pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang pada akhirnya mendukung pembangunan berkelanjutan pariwisata maritim di Kota Bago dan Pulpandan. Adapun gap dalam penelitian ini adalah Keterbatasan masyarakat lokal dalam memahami potensi pariwisata. Dan masalah pengelolaan</p>	<p>adalah Keterbatasan masyarakat lokal dalam memahami potensi pariwisata. Dan masalah pengelolaan limbah di Pulpandan.</p>
--	--	---	---	--	--	---

					limbah di Pulupandan.	
6.	(Annida & Taofiqurohm an, 2024)	<i>Community Empowerme nt Strategy in Maritime Tourism: A Qualitative Approach in Pari Island, Thousand Islands, Indonesia</i>	Menganalisi s strategi pemberdaya an masyarakat dalam pengelolaan pariwisata laut. Berkontribu si pada model pemberdaya an masyarakat yang berkelanjuta n dalam pariwisata.	Wawancara mendalam dan observasi partisipatif dilakukan. Dokumentas i digunakan untuk pengumpula n data.	Studi ini menekankan strategi pemberdayaa n masyarakat dalam pariwisata maritim di Pulau Pari, dengan fokus pada partisipasi inklusif, manfaat ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan, selaras dengan tujuan pembanguna n berkelanjutan dengan mempromosik an keterlibatan lokal dan melestarikan ekosistem laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kurangnya dukungan	Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kurangnya dukungan keuangan untuk usaha kecil. Kesenjangan dalam akses ke pendidikan pariwisata bagi masyarakat kurang mampu.

					keuangan untuk usaha kecil. Kesenjangan dalam akses ke pendidikan pariwisata bagi masyarakat kurang mampu.	
7.	(Marušić et al., 2024)	<i>Perspective Chapter: Nautical Tourism Degrowth – Sustainable Solutions in the Nautical Ports' Value Chain</i>	untuk menyelidiki solusi degrowth dalam pariwisata bahari dengan memanfaatkan kerangka rantai nilai, dengan fokus pada praktik berkelanjutan dalam kegiatan utama dan pendukung pelabuhan bahari.	Metode yang digunakan dengan memanfaatkan kerangka rantai nilai, yang meneliti kegiatan utama dan pendukung dalam pelabuhan bahari untuk mengidentifikasi praktik berkelanjutan. Data sekunder mencakup praktik bisnis pelabuhan bahari, persyaratan untuk sertifikat lingkungan, tujuan pembangun	Hasil dari penelitian ini perlunya eksplorasi lebih lanjut dari strategi degrowth yang spesifik yang dapat diterapkan secara efektif dalam pariwisata bahari, terutama dalam kaitannya dengan tantangan unik yang dihadapi oleh komunitas pesisir yang berbeda dan pelabuhan bahari masing-masing. Ini termasuk memahami	kekurangan data empiris yang komprehensif tentang dampak jangka panjang dari penerapan strategi degrowth dalam pariwisata bahari, terutama mengenai efektivitasnya dalam mengurangi dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sambil tetap mendukung pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja

				an berkelanjuta n, dan inovasi hijau di sektor bahari.	konteks sosial ekonomi lokal dan bagaimana mereka mempengaru hi adopsi praktik berkelanjutan.	di daerah pesisir. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menilai hasil dari strategi ini pada lingkungan laut dan budaya lokal.
--	--	--	--	---	---	---

Sumber: diadaptasi dari berbagai sumber

1.7 Kerangka Konseptual

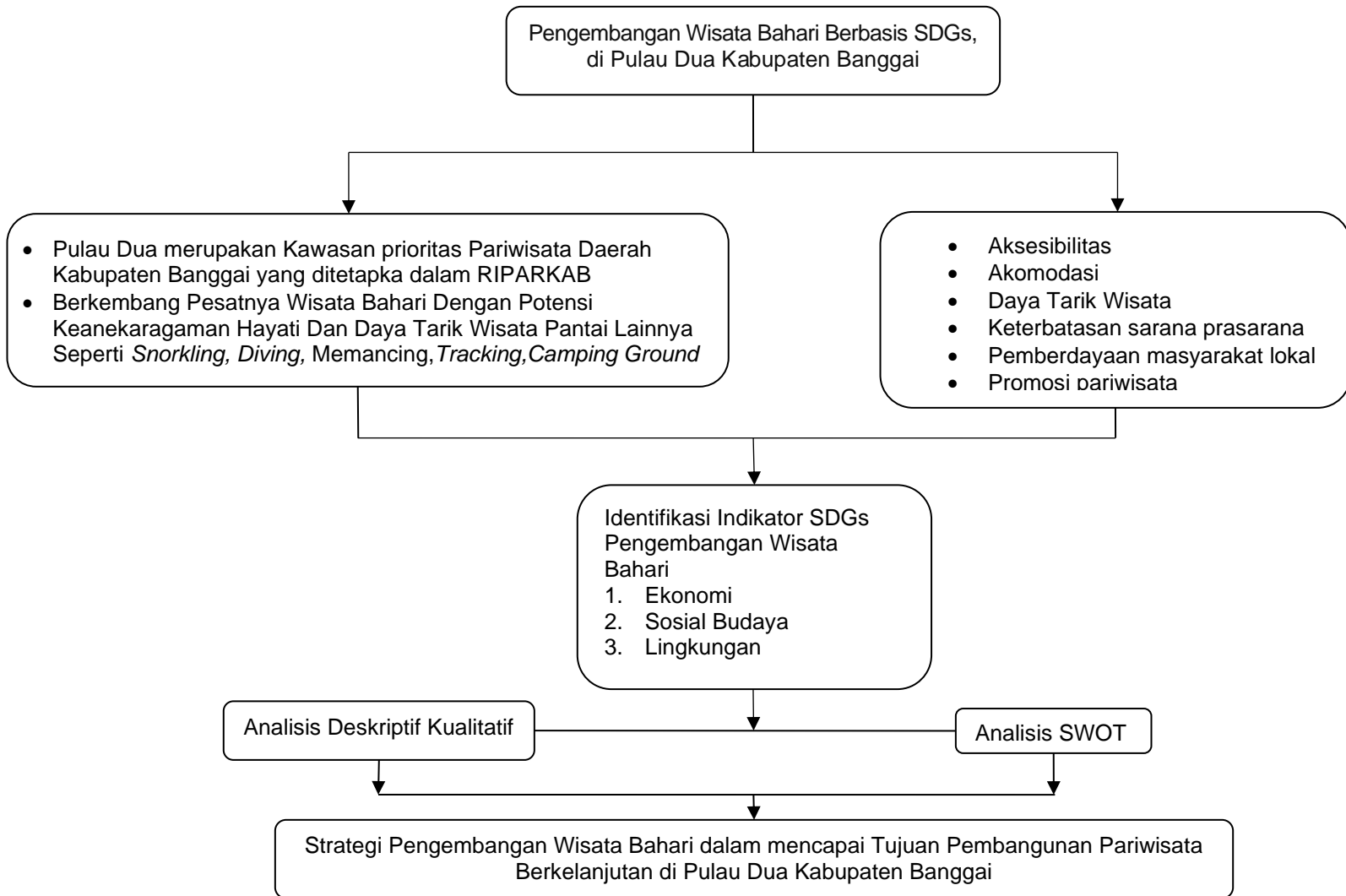
Kerangka konseptual ini menggambarkan strategi pengembangan wisata bahari di Pulau Dua, Kabupaten Banggai, dengan pendekatan berbasis *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal ini menegaskan bahwa Pulau Dua ditetapkan sebagai kawasan prioritas pariwisata daerah Kabupaten Banggai berdasarkan RIPARKAB. Posisi tersebut menunjukkan bahwa Pulau Dua memiliki potensi yang signifikan untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata bahari unggulan. Keanekaragaman hayati laut, terumbu karang, serta pantai berpasir putih menjadi daya tarik utama yang potensial untuk diintegrasikan dengan aktivitas wisata seperti *snorkeling*, *diving*, *fishing*, *hiking*, dan *camping*. Dengan demikian, pengembangan pariwisata Pulau Dua harus diarahkan pada konsep berkelanjutan agar tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem laut dan pesisir.

Kerangka ini juga menampilkan permasalahan mendasar yang masih dihadapi dalam pengembangan wisata bahari Pulau Dua. Beberapa di antaranya meliputi keterbatasan aksesibilitas, minimnya akomodasi, terbatasnya sarana prasarana, kurangnya pemberdayaan masyarakat lokal, serta promosi pariwisata yang belum optimal. Permasalahan ini menjadi faktor penghambat dalam upaya menjadikan Pulau Dua sebagai destinasi berdaya saing. Oleh karena itu, identifikasi masalah tersebut penting untuk merumuskan strategi yang dapat memperbaiki kelemahan sekaligus mengoptimalkan potensi yang ada.

Selanjutnya, kerangka konseptual ini mengarahkan analisis pada indikator SDGs yang digunakan sebagai dasar dalam menilai keberlanjutan pengembangan wisata bahari di Pulau Dua. Indikator tersebut meliputi aspek ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Indikator ekonomi mencakup penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, serta pertumbuhan usaha lokal. Indikator sosial-budaya berhubungan dengan pelestarian nilai dan kearifan lokal, partisipasi masyarakat, serta pemerataan manfaat. Sedangkan indikator lingkungan menitikberatkan pada konservasi ekosistem, pengelolaan sampah,

dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, pengembangan wisata bahari dapat diarahkan pada tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kerangka ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan wisata bahari di Pulau Dua akan dirumuskan melalui analisis deskriptif kualitatif dan analisis SWOT. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi eksisting secara rinci berdasarkan data observasi lapangan, sementara analisis SWOT membantu dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Hasil dari kedua analisis ini akan menghasilkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Pulau Dua. Dengan demikian, kerangka konseptual ini tidak hanya menggambarkan alur pemikiran penelitian, tetapi juga menjadi peta jalan bagi pengembangan Pulau Dua sebagai destinasi bahari berbasis SDGs yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Tentunya keberhasilan pengembangan wisata bahari berbasis SDGs di Pulau Dua sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, masyarakat lokal, dan wisatawan. Implementasi strategi yang telah dirancang harus memperhatikan aspek keberlanjutan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Studi dari Hassan et al. (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis SDGs, Pulau Dua dapat berkembang menjadi destinasi wisata bahari unggulan yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.



Gambar 1. 3 Kerangka Konseptual

1.7.1 Pariwisata Berkelanjutan dan Sustainable Development Goals (SDGs)

Teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pariwisata berkelanjutan. Teori ini dikemukakan oleh Bramwell pada tahun 1993. Menurutnya pariwisata berkelanjutan merupakan suatu pengembangan lingkungan yang memiliki dampak positif untuk sekitarnya yang dapat dirasakan untuk saat ini dan masa yang akan datang. Adapun menurut (Chamdani, 2018) pariwisata berkelanjutan merupakan sebuah konsep pengembangan pariwisata yang memberi manfaat dan keuntungan pada aspek ekonomi, budaya dan lingkungan. Dalam aspek ekonomi secara berkelanjutan berdampak positif kepada pemangku kepentingan seperti adanya lapangan pekerjaan yang bisa menjadi jalan keluar dalam permasalahan kemiskinan. Aspek sosial berperan untuk melestarikan sosial di sekitar destinasi wisata dengan melibatkan masyarakat dalam pengembangan dengan memanfaatkan produk lokal dengan tidak mengesampingkan nilai budaya sehingga memberi nilai tambah ekonomi. Selain itu pariwisata secara berkelanjutan juga harus mempertimbangkan aspek lingkungan yaitu dengan mendayagunakan sumber daya alam sebagai daya tarik wisata, dan melakukan upaya untuk pelestarian serta pengembangan lingkungan.

Pariwisata berkelanjutan telah menjadi paradigma utama dalam perencanaan dan pengembangan destinasi, seiring meningkatnya kesadaran akan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kegiatan pariwisata. Konsep ini mengacu pada pengelolaan destinasi yang mampu memenuhi kebutuhan wisatawan dan komunitas penerima tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Butler, 2024). Dalam konteks global, pariwisata dipandang sebagai instrumen penting untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Beberapa sasaran yang paling terkait dengan sektor pariwisata adalah SDGs 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, SDGs 12 tentang Konsumsi , serta SDGs 14 tentang ekosistem laut (Lavaredas et al., 2025).

Kajian bibliometrik menunjukkan bahwa penelitian pariwisata berkelanjutan dalam lima tahun terakhir semakin menekankan integrasi indikator SDGs ke dalam strategi destinasi. Selain itu, terdapat perhatian besar terhadap penerapan inovasi seperti *green tourism*, *smart tourism*, dan pendekatan *blue economy* yang diyakini mampu memperkuat daya saing sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan

(Strippoli et al., 2024). Dengan demikian, kerangka SDGs tidak hanya berfungsi sebagai acuan normatif, tetapi juga sebagai alat praktis untuk mengukur sejauh mana pariwisata berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

1.7.2 Dimensi Berkelanjutan Aspek Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan

a. Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi pariwisata sering dikaitkan dengan teori *tourism-led growth hypothesis*, yang menekankan kontribusi pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. Namun, studi terbaru menunjukkan bahwa pengukuran dampak ekonomi pariwisata yang hanya berfokus pada indikator makro seperti PDB dan *multiplier effect* cenderung mengabaikan eksternalitas negatif terhadap lingkungan dan sosial (Liu, 2022). Karena itu, pendekatan baru mendorong penilaian ekonomi yang lebih komprehensif dengan memperhitungkan biaya sosial, lingkungan dan keterkaitan lintas sektor, termasuk dalam kerangka *blue economy* (Flor et al., 2025). Diversifikasi mata pencaharian lokal, peningkatan lapangan kerja, dan penerapan model bisnis sirkular menjadi strategi yang banyak direkomendasikan dalam literatur terkini (Strippoli et al., 2024).

b. Aspek Sosial

Dimensi sosial pariwisata tidak kalah penting, terutama terkait kesejahteraan masyarakat lokal, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta keberlanjutan budaya. Konsep *community based tourism* (CBT) telah menjadi kerangka utama untuk menjelaskan bagaimana masyarakat dapat terlibat aktif dalam pengelolaan destinasi. Reindrawati et al. (2023) dalam kajian sistematis menemukan bahwa partisipasi masyarakat seringkali masih terbatas karena adanya kendala struktural, seperti ketimpangan akses, keterbatasan kapasitas, dan dominasi pihak eksternal. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan lokal dan korelasi kebijakan antara masyarakat, pemerintah, dan swasta dipandang penting untuk memastikan distribusi manfaat yang lebih adil. Selain itu, pariwisata yang berorientasi pada pelestarian budaya lokal berperan dalam memperkuat identitas serta meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap destinasi mereka.

c. Aspek Lingkungan

Lingkungan menjadi dimensi krusial dalam pariwisata bahari karena ekosistem laut dan pesisir sangat rentan terhadap tekanan aktivitas manusia. Konsep *carrying capacity* atau daya dukung menjadi kerangka teoritis utama dalam menilai sejauh mana destinasi mampu menerima jumlah kunjungan tanpa

menimbulkan kerusakan ekosistem (Aguilar Calderon et al., 2025). Lebih lanjut, pendekatan berbasis *ecosystem services* menekankan pentingnya valuasi terhadap jasa ekosistem, baik *provisioning* (sumber daya perikanan), *regulating* (penyerap karbon pesisir), maupun *cultural services* (rekreasi, identitas budaya) (Chalkiadakis et al., 2022). Tregarot et al. (2024) menunjukkan bahwa perubahan iklim memperbesar risiko ekologis, termasuk *bleaching* terumbu karang dan kenaikan muka air laut, sehingga strategi mitigasi adaptif menjadi sangat mendesak.

1.7.3 Teori Pengembangan Wisata Bahari

Wisata bahari merupakan subsektor pariwisata yang sangat dipengaruhi oleh dinamika ekologi laut dan tata kelola pesisir. Salah satu teori pengembangan yang sering digunakan adalah *Tourism Area Life Cycle* (TALC) yang menggambarkan tahapan siklus destinasi mulai dari eksplorasi, pengembangan, hingga stagnasi dan revitalisasi (Butler, 2024). Namun, dalam konteks bahari, pengembangan destinasi juga harus dipahami melalui kerangka *socio ecological systems* (SES) yang menekankan interaksi antara manusia dan ekosistem (Baltranaitė et al., 2025). Selain itu, pendekatan *blue economy* menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi laut dan konservasi. Studi terbaru juga menyoroti integrasi *circular economy* dalam pengembangan wisata bahari, misalnya melalui praktik pengurangan plastik sekali pakai dan peningkatan daur ulang limbah wisata (Flor et al., 2025).

1.7.4 Komponen Pariwisata

Dalam menganalisis kesiapan suatu destinasi, kerangka 6A (*Attractions, Accessibility, Amenities, Accommodation, Activities, Ancillary services*) banyak digunakan. Kerangka ini membantu memetakan kekuatan dan kelemahan destinasi dalam menyediakan daya tarik wisata, aksesibilitas transportasi, fasilitas pendukung, akomodasi, aktivitas wisata, dan layanan tambahan (Arif et al., 2020). Penelitian terbaru menegaskan bahwa penerapan kerangka 6A mampu membantu pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pengembangan, misalnya menilai kesenjangan antara daya tarik alamiah dan kesiapan infrastruktur (Xu et al., 2025). Dengan demikian, 6A tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai pedoman perencanaan strategis.

1.7.5 Daya Tarik Wisata Bahari

Daya tarik wisata bahari mencakup keunikan ekosistem laut seperti terumbu karang, lamun, dan mangrove, serta aktivitas rekreasi seperti diving, snorkeling, dan

ekowisata bahari. Selain aspek alamiah, terdapat pula atraksi budaya pesisir yang memperkuat daya tarik destinasi. Suresh et al. (2025) menekankan pentingnya mengintegrasikan wisata bahari dengan ekosistem *blue carbon* seperti mangrove dan padang lamun yang tidak hanya memiliki nilai rekreasi, tetapi juga berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. Pendekatan berbasis jasa ekosistem pesisir mendorong valuasi daya tarik wisata bukan hanya dari segi estetika, tetapi juga dari nilai ekologi dan manfaat sosial yang dihasilkan (Baltranaitė et al., 2025).

Adapun tantangan dalam pengembangan wisata bahari. Pertama, tantangan ekologis seperti degradasi terumbu karang, pencemaran laut, serta dampak perubahan iklim yang meningkatkan risiko bencana alam (Trégarot et al., 2024). Kedua, tantangan tata kelola, termasuk lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan dan rendahnya penegakan regulasi di kawasan pesisir (Osorio et al., 2023). Ketiga, tantangan sosial, yakni keterbatasan kapasitas masyarakat lokal, ketidaksetaraan distribusi manfaat, dan keterlibatan komunitas yang masih rendah (Reindrawati et al., 2023). Keempat, tantangan ekonomi dan infrastruktur, seperti keterbatasan akses transportasi, ketergantungan pada musim kunjungan, serta permasalahan pengelolaan limbah di pulau kecil (Flor et al., 2025). Dengan memahami kendala-kendala ini, strategi pengembangan wisata bahari dapat disusun lebih adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. M. ARAFANDI. (2020). Analisis Pengembangan Wisata Pantai Di Kabupaten Sinjai: Studi Kasus Pantai Hubat Dan Pantai Bulokkong. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49–58.
- Annida, S. B., & Taofiqrohman, A. (2024). *Community Empowerment Strategy in Maritime Tourism : A Qualitative Approach in Pari Island , Thousand Islands , Indonesia*. 2(1), 69–74.
- Armida Salsiah Alisjahbana, E. M. (2021). Sustainable Transport, Sustainable Development. In *Sustainable Transport, Sustainable Development*. <https://doi.org/10.18356/9789210010788>
- Bappenas. (2017). *Voluntary National Review (VNR): Eradicating poverty and promoting prosperity in a changing world*. xix, 138. <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15705Indonesia.pdf>
- Cooper et al. (2008). *Tourism Principle & Practice*.
- Dewi, R., Pitri, P., Siregar, I., & Purnomo, B. (2023). Kontribusi Pelabuhan Talang Duku Terhadap Sektor Perekonomian Masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. *Journal of Indonesian History*, 11(1), 1–9. <https://doi.org/10.15294/jih.v11i1.67506>
- Harofah, C., & Mutaqin, E. Z. (2023). Strategi Pengembangan Wisata Budaya Yang Berkelanjutan Di Destinasi Wisata Djagongan Koena Kejawar Banyumas. *Jurnal Industri Pariwisata*, 6(1), 14–26. <https://doi.org/10.36441/pariwisata.v6i1.1150>
- Hayati, M., Ferdi, M., & Putra, O. (2023). *PENGEMBANGAN PRODUK BERBASIS PARIWISATA LAUT UNTUK*. 6(3), 149–156.
- Hilyatin, D. L., & Hanifah, U. (2020). Pengembangan Ekonomi Islam Lokal Sektor Pertanian Melalui Agrowisata “Botania Garden (Bogar)” Desa Karangcengis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics*, 02(01), 37–48. <https://doi.org/10.32424/1.ijibe.2020.2.1.3005>
- Manafi, Dr. Muh. Rasman, et al. (2021). *Menata Ruang Laut Indonesia*. Jakarta: Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi.
- Marušić, E., Kovačić, K., & Peronja, I. (2024). *Perspective Chapter: Nautical Tourism Degrowth – Sustainable Solutions in the Nautical Ports’ Value Chain*. 1–22. <https://doi.org/10.5772/intechopen.1007566>
- Nurbadriyah, A. (2024). PERWUJUDAN GREEN ECONOMY MELALUI PREOGRAM PAWON URIP UNTUK MEMENUHI TUJUAN SDGs. *PERWUJUDAN GREEN ECONOMY MELALUI PREOGRAM PAWON URIP UNTUK MEMENUHI TUJUAN SDGs*, 1–10. <https://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/242>
- Pillo, M., Montelibano, J. M., Gemotea, O. E., & Lorilla, M. (2021). Integrated Sustainable Ecotourism Development Plan Through a Community-Based Approach for Bago City and Pulpandan. *Journal of Higher Education Research*, 9, pp 1. <https://scispace.com/papers/integrated-sustainable-ecotourism-development-plan-through-a-3pcm5xbyomr>
- Pranoto, B., Utami, T., & Sunesti, Y. (2023). Pengembangan Desa Wisata Berjo Menuju SDGs Desa Mandiri dan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12(2), 381–395. <https://doi.org/10.23887/jish.v12i2.61185>
- UNWTO. (2021). Sustainable Development. <https://www.unwto.org/sustainable-development>

- Aguilar Calderón, P. A., et al. (2025). Tourism carrying capacity in coastal destinations. *Sustainability*, 17(3), 123–135.
- Arif, Y. M., et al. (2020). Selection of tourism destinations priority using 6AsTD. *Journal of Environmental Management & Tourism*, 11(5), 1074–1083.
- Baltranaite, E., et al. (2025). Tourism impacts on marine and coastal ecosystem services: A systematic review. *Discover Sustainability*, 6(1), 55.
- Butler, R. (2024). Tourism destination development: The tourism area life cycle revisited. *Journal of Tourism Futures*, 10(2), 87–101.
- Chalkiadakis, C., et al. (2022). Ecosystem service flows in marine systems. *Ecosystem Services*, 55, 101–118.
- Flor, D., et al. (2025). Positive tipping points for circular economy in islands. *Journal of Cleaner Production*, 463, 143–159.
- Lavaredas, A., et al. (2025). SDGs in tourism research: A bibliometric and systematic literature review (2015–2023). *Discover Sustainability*, 6(2), 74.
- Liu, A. (2022). Toward an accurate assessment of tourism economic impact: A systematic review. *Tourism Management*, 90, 104–114.
- Osorio-Molina, F. M., et al. (2023). Quantitative empirical studies on tourism–environment–economy nexus: A systematic review. *Ecological Economics*, 208, 107–122.
- Reindrawati, D. Y., et al. (2023). Challenges of community participation in tourism planning: A systematic review. *Cogent Social Sciences*, 9(1), 223–238.
- Rondonuwu, C.V., Tarore, R.C. and Mastutie, F. (2020) 'Kajian Perubahan Penggunaan Lahan di Kawasan Pesisir Kota Manado (Studi Kasus: Kecamatan Malalayang, Sario, dan Wenang)', *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 7(1), pp. 134–143.
- Strippoli, R., et al. (2024). Circular economy and sustainable development in tourism: A review. *Heliyon*, 10(7), e21123.
- Suresh, A., et al. (2025). Tourism and recreation in blue carbon ecosystems: Opportunities for sustainability. *Ocean & Coastal Management*, 258, 107–142.
- Trégarot, E., et al. (2024). Effects of climate change on marine coastal ecosystems: A review. *Biological Conservation*, 290, 110–135.
- Xu, N., et al. (2025). Coastal tourism carrying capacity: Insights and frameworks. *Discover Sustainability*, 6(1), 12.

BAB II

KONDISI AKTUAL PENGEMBANGAN WISATA BAHARI DI PULAU DUA

2.1 Pendahuluan

Perkembangan sektor pariwisata di Indonesia saat ini dipandang sebagai sektor yang menyajikan keuntungan karena banyak potensi destinasi pariwisata yang dapat dikembangkan secara optimal (Robo et al., 2023). Keindahan alam, kekayaan budaya, dan keramahan masyarakat menjadi daya tarik utama bagi wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia (Mukti, 2020). Perkembangan destinasi pariwisata di Indonesia tidak terlepas dari peran penting destinasi wisata di tingkat daerah. Keberagaman destinasi wisata di berbagai daerah, mulai dari pantai, gunung, hutan, hingga budaya, menjadi daya tarik utama yang mendorong pertumbuhan sektor pariwisata.

Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) akan mendorong permintaan pariwisata. Permintaan pariwisata memberi kesempatan kepada masyarakat dalam menentukan serta ikut andil berpartisipasi dalam mengelola dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Selain itu, destinasi pariwisata memiliki daya tarik tersendiri. Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2009 daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Daya tarik wisata di suatu daerah menjadi ciri dari daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder di wilayahnya (Pratami et al., 2021).

Aktivitas wisata bahari yang sangat populer diantaranya yaitu snorkling (*snorkeling*), menyelam (*diving*), berselancar (*surfing/bodyboarding*), dan bersampan. Atraksi ini memang merupakan pengalaman yang sangat menarik bagi para wisatawan. Dalam mengembangkan pariwisata bahari penting untuk memperhatikan indikator aspek keberlanjutan yang meliputi aspek sosial budaya (*people*), ekonomi (*profit*) dan lingkungan (*planet*). Saat ketiga aspek tersebut berdampak negatif maka akan berimplikasi pada terhambatnya pencapaian misi pembangunan berkelanjutan pemerintah pusat dan daerah yang merupakan

bagian dari implementasi program *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang diusung di PBB.

SDGs merupakan tujuan global dan telah menjadi pilihan negara Indonesia untuk berperan dalam pencapaian total 17 tujuan dan 169 target pada tahun 2030 mendatang. SDGs pada prinsipnya merupakan kerangka pembangunan yang terintegrasi dan saling berkaitan satu sama lain. Hal ini juga terlihat dalam pengembangan pariwisata bahari atau jenis pariwisata lainnya. Semua sektor disarankan untuk dikembangkan dengan cara yang berorientasi pada *People* (masyarakat), *Planet* (planet/lingkungan), *Prosperity* (Kesejahteraan), *Peace* (Perdamaian), dan *Partnership* (Kerjasama) (Tourism For SDGs Platform, 2022)

Wisata Pulau Dua merupakan objek wisata bahari andalan yang memberikan banyak fasilitas, dan beragam masakan khas daerah dan dari luar daerah Kabupaten Banggai yang tersedia di sepanjang kawasan wisata yang menunggu para investor untuk mengembangkan potensi keindahan alam yang ada. Potensi wisata di Pulau Dua, meliputi spot untuk berswafoto, snorkeling, dan diving. Terdapat kurang lebih 35 spot diving yang tersebar di sekitar perairan Pulau Dua, seperti Ondoliang Rock, Nemo Rock, Alibaba, Batu Gong dan masih banyak lagi yang lainnya.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2037, menjelaskan kedudukan kawasan wisata Pulau Dua yang selanjutnya disebut sebagai KPU-WP3K-164 yang artinya, kawasan tersebut merupakan Kawasan Pemanfaatan Umum yang ditetapkan dengan tujuan untuk mengalokasikan ruang laut yang dipergunakan bagi kepentingan ekonomi, sosial dan budaya. Pengembangan kawasan pemanfaatan umum dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah WP-3-K (wisata pesisir dan pulau pulau kecil) ditinjau dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Guna mencapai tujuan studi, maka dibutuhkan upaya yang meliputi analisis kawasan, studi kelayakan, dan Penyusunan arah pengembangan dari hasil identifikasi objek wisata.

2.1.1 Pengembangan Wisata Bahari

Pengembangan objek wisata tidak hanya terdiri dari objek wisata itu sendiri, perlu ada pelayanan, jasa, pemasaran, dan aksesibilitas yang mendukungnya.

Daya tarik yang belum dikembangkan merupakan sumberdaya potensial dan tidak dapat disebut sebagai daya tarik wisata, sampai adanya pengembangan tertentu yang dilakukan. Objek dan daya tarik wisata merupakan pedoman dari kepariwisataan. Tanpa adanya daya tarik di suatu daerah wisata, maka destinasi wisata sulit untuk dikembangkan (Putra, A.E., 2018).

Secara umum, daya tarik wisata memiliki tiga kategori, (Marpaung, 2002) :

1. Daya tarik wisata alam, yang berasal dari kondisi alam yang ada; ini termasuk keterkaitan dengan alam seperti pantai, bahari, gunung, daerah liar dan terpencil, taman, dan daerah konservasi.
2. Daya tarik budaya: objek wisata yang berasal dari kondisi sosial budaya masyarakat seperti adat istiadat, tradisi, ritual, dan acara tradisional, serta peninggalan sejarah seperti gua-gua prasejarah, candi, dan benteng.
3. Daya tarik buatan adalah daya tarik yang menghasilkan sesuatu dari buatan manusia atau termasuk sebagai daya tarik khusus.

Prinsip-prinsip wisata pesisir atau bahari yang berkelanjutan, diantaranya yaitu:

1. Prinsip keseimbangan, yaitu pengelolaan harus seimbang antara pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan konservasi.
2. Prinsip partisipasi masyarakat, yaitu dalam pengelolaan wisata selalu melibatkan masyarakat.
3. Prinsip konservasi, yaitu mempunyai kepedulian, komitmen, dan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan baik alam maupun budaya.
4. Prinsip keterpaduan, yaitu dalam pengelolaan dan pembangunan berbagai sektor selalu memperhatikan kondisi ekosistem.
5. Prinsip penegakan hukum, yaitu pengembangan dan pengelolaan wisata berdasarkan aturan-aturan dan hukum yang berlaku agar dapat menjamin kepastian hukum (Musaddun et al., 2013).

Pengembangan wisata bahari ialah alternatif untuk memacu adanya potensi ekonomi dan usaha pelestarian melalui penataan kembali potensi maupun kekayaan alam serta hayati dengan menciptakan model dalam mengelola daerah wisata yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan (Rijal et al., 2023).

Pengembangan wisata bahari merupakan salah satu bentuk upaya pengelolaan daerah wisata pesisir yang bertujuan untuk mendatangkan manfaat khususnya pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan potensi wisata dan jasa lingkungan sumber daya alam (Augustinah et al, 2018). Gumelar dalam (Lawang,

2015) dalam pengembangan wisata bahari memberikan beberapa pendekatan seperti:

- 1) Pengembangan wisata bahari lebih dimanfaatkan dan diarahkan untuk usaha mengembangkan daerah wisata yang ramah lingkungan.
- 2) Harus terhindar dari perusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta pemakaian sumber daya alam yang boros.
- 3) Harus mementingkan faktor waspada pada dampak dari lingkungan khususnya bagi kunjungan wisatawan yang tidak terkendali untuk memelihara sumber daya alam atau kualitas dari lingkungan hidup, dan keberlanjutan pembangunan ekonomi yang terjamin (Suhardono et al., 2023).

Menurut Sobari dalam Anindita (2015) terdapat empat prinsip yang dilandaskan dalam pengembangan pariwisata, yakni:

- 1) Keberlanjutan ekologi, yaitu pengembangan wisata bahari harus menjamin perlindungan dan pemeliharaan terhadap sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai daya tarik sebuah wisata, seperti hutan, danau, pantai, lingkungan, sungai, dan laut.
- 2) Keberlanjutan sosial dan budaya, yaitu pengembangan wisata bahari harus dapat meningkatkan peran masyarakat dalam mengawasi tata kehidupan melalui sistem nilai yang ada di masyarakat setempat.
- 3) Keberlanjutan ekonomi, yaitu pengembangan wisata bahari harus dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk seluruh pihak agar terlibat dalam kegiatan ekonomi melalui sistem ekonomi yang kompetitif.
- 4) Memperbaiki dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekitar melalui partisipasi dalam mengembangkan sebuah wisata (Robinson et al., 2019).

Komponen wisata merupakan hal yang penting dalam mempengaruhi wisatawan pada saat memilih tujuan wisata. Sunaryo memaparkan ada beberapa komponen dalam pengembangan wisata, yaitu:

- 1) Objek dan daya tarik (*Attractions*), yaitu meliputi daya tarik yang berasal dari kekayaan alam, buatan, dan budaya, seperti event atau minat khusus.
- 2) Amenitas (*Amenities*), yaitu meliputi fasilitas yang menunjang dan mendukung wisata, seperti akomodasi, toko cinderamata, dan fasilitas kenyamanan lainnya dalam hal ini sudah terdapat beberapa fasilitas yang disediakan di Pulau Dua yakni adanya homestay dan penginapan ecolodge

yang dimiliki oleh masyarakat pulau dua sehingga dapat mendorong dari segi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

3) Fasilitas pendukung (*Ancillary Services*), yaitu adanya fasilitas pendukung bagi wisatawan, seperti telekomunikasi, rumah sakit/Puskesmas, dan lainnya.

4) Aksesibilitas (*Accesibility*), yaitu meliputi sistem transportasi yang mendukung, seperti fasilitas terminal, jalur atau rute transportasi, pelabuhan, dan lainnya.

5) Kelembagaan (*Institutions*), yaitu peran atau keberadaan pihak yang mendukung terlaksananya aktivitas wisata termasuk masyarakat lokal (Miswan & Sukaesih, 2019).

Komponen wisata menurut (Arasy et al., 2019), yang dikategorikan dengan hasil (*product*) industri pariwisata adalah seluruh jasa-jasa (*services*) yang terpenuhi pada wisatawan semenjak ia berangkat sampai dia kembali ke kediamannya dimana dia tinggal. Produk wisata terdiri dari berbagai unsur dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, yaitu: 1) *attractions* (daya tarik); 2) *amenity* (fasilitas); 3) aksesibilitas; dan 4) promosi dan Informasi. Indikator wisata bahari yang berkelanjutan yaitu daerah yang bisa memelihara dan melindungi ekosistem pesisir, dimana meliputi pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, melestarikan hutan mangrove, keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam mengelola kawasan pesisir (Permatasari & Umilia, 2020). Selain itu, keberhasilan wisata bahari apabila memenuhi beberapa komponen yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan yang alami, kesejahteraan penduduk di kawasan tersebut, kepuasan pengunjung saat menikmati, dan keterpaduan komunitas dengan daerah pengembangannya (Hasriyanti et al., 2019).

Objek wisata merupakan komponen penting dalam sektor pariwisata yang harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, seperti jalan, informasi, terminal, jembatan, dan lain-lain (Yoeti 2019). Oleh karena itu, penting untuk menetapkan variabel penilaian yang dapat mengukur potensi kelayakan berbagai objek wisata bahari, yang meliputi: (1) kondisi lingkungan alam (keindahan pemandangan, keunikan alam) serta warisan budaya, (2) sarana prasarana sebagai faktor pendukung (aksesibilitas, jarak, penataan objek,

fasilitas pendukung, keamanan, dan kenyamanan), dan (3) aspek pengembangan.

2.2.2 Konsep Pariwisata Berkelanjutan

Menurut Piagam Pariwisata Berkelanjutan Pitana dari tahun 2002, pembangunan pariwisata harus didasarkan pada standar keberlanjutan, yang mengacu pada pertumbuhan kualitatif di mana pembangunan dapat dipertahankan secara lingkungan dalam jangka panjang serta layak secara ekonomi, moral, dan adil bagi masyarakat. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai upaya yang terorganisir dan terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pengelolaan. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan harus memanfaatkan sumber daya alam semaksimal mungkin sambil memberikan dukungan dan penghargaan kepada lingkungan sosial dan budaya. Ini berarti bahwa pembangunan pariwisata harus didasarkan pada prinsip keberlanjutan, yang berarti bahwa pembangunan dapat bermanfaat bagi lingkungan dalam jangka panjang, menguntungkan secara finansial, adil secara moral, dan adil bagi masyarakat. (Evita et al., 2015)

Teori Burns dan Holden, 1997 mengemukakan bahwa, kegiatan wisata dianggap berkelanjutan jika memenuhi ketentuan berikut :

1. Secara ekonomi meningkatkan daya saing produk wisata bahari dapat dicapai dengan meningkatkan keragaman kegiatan ekonomi, yang dapat menghasilkan dua kali lipat pendapatan dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Orang-orang di pesisir dapat memperoleh pendapatan yang signifikan dari berbagai sumber, seperti penyewaan kapal dan bisnis seperti toko souvenir dan restoran.
2. Secara sosial dapat diterima, yaitu berkaitan dengan kemampuan penduduk setempat untuk menampung sektor pariwisata (industri dan wisatawan) tanpa menimbulkan keresahan sosial Dalam kegiatan wisata bahari, tujuan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, setiap pemangku kepentingan harus berpartisipasi dalam program agar dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

3. Secara ekologi berkelanjutan, terutama pertumbuhan pariwisata tidak berdampak negatif pada lingkungan regional. Untuk melindungi ekosistem dan sumber daya alam dari kerusakan yang disebabkan oleh pariwisata, upaya konservasi diperlukan.

Menurut Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat setempat. Ini juga berlaku untuk semua jenis kegiatan pariwisata di semua jenis destinasi, termasuk wisata masal dan berbagai kegiatan wisata.

Indikator yang dapat diukur untuk menentukan tiga aspek pariwisata berkelanjutan: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Mereka menggunakan teori dari Yoeti (2008), Alister dan Wall (1982), dan UNWTO (2004) dalam (Rahmayani et al., 2021) tentang indikator pembangunan berkelanjutan untuk destinasi wisata. Hasilnya ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Variabel, Subvariabel, Dimensi dan Indikator Wisata Bahari

Variabel	Sub-variabel	Dimensi	Indikator
Ekonomi	Peningkatan Ekonomi Lokal	Keterlibatan Masyarakat Lokal	Persentase tenaga kerja lokal dalam industri pariwisata
		Pendapatan Masyarakat	Peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat setempat
Lingkungan	Konservasi Ekosistem	Pelestarian Ekosistem Pesisir	Luas area mangrove yang dilestarikan
	Pengelolaan Sampah	Sistem Pengelolaan Sampah	Tersedianya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai
Sosial dan Budaya	Kesejahteraan Sosial	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah program pelatihan bagi masyarakat lokal
	Pelestarian Budaya	Partisipasi dalam Kegiatan Budaya	Jumlah event budaya lokal yang diselenggarakan

Sumber : (Rahmayani et al., 2021)

Beberapa indikator pengembangan pariwisata pesisir atau bahari yang berkelanjutan meliputi:

- 1) Pemeliharaan dan perlindungan ekosistem kawasan pesisir melalui konservasi.

- 2) Pemanfaatan potensi pariwisata pesisir dengan memberdayakan masyarakat untuk turut serta dalam kontribusi kegiatan ekonomi.
- 3) Meningkatkan jumlah kunjungan di lokasi pariwisata pesisir.
- 4) Mempertahankan kekuatan dan keberlanjutan kebudayaan masyarakat lokal sebagai daya tarik bagi pengunjung di sebuah wisata (Musaddun et al., 2013).

Dalam mewujudkan pengembangan pariwisata bahari yang berkelanjutan dan selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs) di Pulau Dua, Kabupaten Banggai, penting untuk memiliki indikator yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi yang sesuai dengan target SDGs tersebut. Keterkaitan antara tujuan penelitian yang diterapkan akan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 2 Sasaran, Komponen isu dan Indikator pariwisata berkelanjutan

No	Sasaran	Komponen Isu	Indikator	Keterangan
1	Kesesuaian pengembangan pariwisata dari aspek ekonomi	Penciptaan lapangan kerja lokal	Menggunakan bahan dan di produksi dari lokal	Kesempatan kerja di kegiatan pariwisata menjadi peluang bagi
			adanya pekerja penuh di sektor pariwisata	pengangguran di sekitar kawasan pariwisata dan
			Mampu menurunkan tingkat pengangguran	bisa memiliki pekerjaan misalnya menjadi <i>tour guide</i>
		Peningkatan kapasitas kualitas pekerja bidang pariwisata	Adanya pekerja bersertifikat di bidang pariwisata	Peningkatan kualitas pekerja dalam kegiatan pariwisata berkelanjutan sangat
Adanya pelatihan bagi pekerja/pengelola pariwisata	mempengaruhi peningkatan pariwisata yang dikembangkan			
2	Kesesuaian pengembangan pariwisata dari aspek sosial	Komunitas (hubungan-kesejahteraan)	Penduduk lokal memiliki penghargaan	Hubungan dan kesejahteraan komunitas dalam pengembangan pariwisata

			Adanya konservasi budaya lokal, keaslian, warisan budaya	berkelanjutan sangat berperan aktif
			Tindakan untuk menjaga integritas struktur komunitas sosial lokal	
		Komunitas (partisipasi-organisasi-keterlibatan)	Masyarakat ikut serta dalam perkembangan/pemeliharaan infrastruktur	Partisipasi komunitas dan keterlibatannya dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan membantu masyarakat dan pengelola pariwisata
			Adanya kepemilikan lokal (<i>homestay</i> /akomodasi lainnya)	
		Pelatihan pekerja lokal	Adanya pelatihan untuk masyarakat lokal	Pelatihan pekerja lokal meningkatkan kualitas masyarakat dalam mengembangkan destinasi menjadi pariwisata berkelanjutan
		Ketersediaan informasi	jenis jaringan yang digunakan untuk promosi	Ketersediaan informasi berkaitan dengan promosi yang dilakukan masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan
			Jumlah orang akses informasi yang disediakan	
3	Kesesuaian pengembangan pariwisata dari aspek Lingkungan	Perlindungan lingkungan secara keseluruhan	Pemeliharaan terhadap ekosistem di sekitar pariwisata	Perlindungan lingkungan secara keseluruhan menjaga kelestarian lingkungan dalam pengembangan destinasi menjadi pariwisata berkelanjutan
			Memiliki tingkat risiko bencana alam yang rendah	
			Upaya pelaksanaan mitigasi bencana alam	

Konsumsi energi dan air	Adanya konsumsi listrik yang efisien	Konsumsi energi dan air yang digunakan oleh pengunjung, sehingga perlu diketahui keberlanjutan konsumsi energi dan air di kawasan wisata
	Ketersediaan energi terbarukan	
	Adanya konsumsi air yang efektif	
	Memiliki kualitas air yang baik	
Pengelolaan sampah	Adanya daur ulang sampah yang dilakukan	Sampah menjadi permasalahan pariwisata sehingga perlu dilakukannya pengelolaan sampah baik sampah padat maupun cair
	Adanya penggunaan ulang sampah	

Sumber : UNWTO (2004) & Balancas dkk (2010)

Tujuan Sustainable Development Goals adalah agenda pembangunan yang telah disepakati oleh negara-negara dunia untuk mensejahterakan masyarakat dan kelestarian bumi, serta ditetapkan sebagai tujuan pembangunan global mencakup 17 tujuan, 169 target, 241 indikator yang akan berakhir pada tahun 2030. Penilaian kondisi ini didasarkan pada Metadata Indikator SDGs Indonesia yang diterbitkan oleh Bappenas. Status terpenuhi diberikan jika variabel di lapangan memenuhi target minimal nasional atau daerah yang tertuang dalam rencana aksi daerah SDGs Kabupaten Banggai. Adapun 17 tujuan pembangunan global tersebut di antaranya:

Tabel 2. 3 Tujuan *Sustainable Development Goals*

No	Tujuan	Deskripsi Tujuan
1	Tanpa kemiskinan	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun
2	Tanpa kelaparan	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan

3	Kehidupan sehat dan sejahtera	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
4	Pendidikan berkualitas	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
5	Kesetaraan <i>gender</i>	Mencapai kesetaraan <i>gender</i> dan memberdayakan kaum perempuan
6	Air bersih dan sanitasi layak	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
7	Energi Bersih dan Terjangkau	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua
8	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
9	Industri, inovasi, dan infrastruktur	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
10	Berkurangnya kesenjangan	Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara
11	Kota dan permukiman yang berkelanjutan	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
12	Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab	Menjadikan pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
13	Penanganan perubahan iklim	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
14	Ekosistem lautan	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan

15	Ekosistem daratan	Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
16	Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Sumber: Hastuti et al., 2022

Dari ke-17 tujuan dalam *Sustainable Development Goals*, terdapat enam tujuan yang sejalan dengan konsep wisata bahari yaitu:

- a. Tujuan 1 tanpa kemiskinan pada target ke 1.a *Sustainable Development Goals*, yaitu menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi. Dengan indikator proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan dan indikator pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial) sebagai presentase dari total belanja pemerintah (Bappenas, 2017:4).
- b. Tujuan ke 8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi pada target ke 9 *Sustainable Development Goals*, yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk

lokal. Dengan indikator proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB (Bappenas, 2020:16).

- c. Tujuan ke 9 industri, inovasi dan infrastruktur pada target ke 2 *Sustainable Development Goals*, yaitu pembangunan infrastruktur untuk konektivitas, peningkatan pertumbuhan industri yang inklusif dan berkelanjutan, penguatan inovasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan indikator secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto. (Bappenas, 2020:16).
- d. Tujuan ke 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab pada target ke 5 *Sustainable Development Goals*, yaitu pada tahun 2030 secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. Dengan indikator jumlah timbunan sampah yang didaur ulang (Bappenas, 2020:72).
- e. Tujuan ke 13 penanganan perubahan iklim pada target ke 3 *Sustainable Development Goals*, yaitu meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim. Dengan indikator jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup (Bappenas, 2020:109).
- f. Tujuan ke 14 terjaganya ekosistem laut pada target ke 4 *Sustainable Development Goals*, yaitu secara efektif mengatur permanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya. Dengan indikator proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis (Bappenas, 2020:128).

2.2 Kondisi Eksisting Pulau Dua

2.2.1 Transportasi

Akses menuju Pulau Dua Kabupaten Banggai dapat melalui jalur darat menggunakan moda kendaraan mobil dan motor dengan jarak tempuh \pm 2-3 jam perjalanan dari ibukota Kabupaten Banggai tepatnya di Luwuk. Pulau Dua merupakan ikon wisata Kabupaten Banggai yang menawarkan ragam aktifitas bagi pengunjung. Pulau Dua berada di Kecamatan Balantak Utara merupakan Kawasan wisata yang berada di tiga wilayah administratif desa yakni di Desa Kampangar, Kuntang dan Pulau Dua.

2.2.2 Daya Tarik Wisata

Pulau Dua menjadi pilihan wisatawan untuk melakukan kegiatan wisata karena beragam aktifitas dan pengalaman yang dapat dirasakan oleh para wisatawan yang berkunjung. Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan perjalanan menjadikan Pulau Dua kembali menjadi pilihan wisatawan untuk berwisata. Aktifitas *diving*, *snorkling* dan *trekking* adalah pilihan aktifitas yang bisa dilakukan oleh wisatawan.



Gambar 2. 1 Wisata Pulau Dua

2.2.3 Akomodasi

Ikon wisata bahari Kabupaten Banggai berada di Pulau Dua. Wilayah perairan (laut) di sekitar pulau dua merupakan lokasi penyelam (*diving* dan *snorkling*) bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Di pulau dua juga terdapat penginapan *Resort Tompotika (Tompotika Dive Lodge)* dan Homestay yang di kelola oleh penduduk lokal dengan harga yang berbeda. Jumlah

penginapan di Pulau Dua masih terbatas, dan pengelolaan homestay belum sepenuhnya menjadi perhatian penduduk lokal. Penduduk lokal dapat menyediakan layanan pengantaran untuk aktifitas diving dan snorkeling bagi wisatawan. *Tompatika dive lodge* adalah salah satu jenis usaha pariwisata yang menyediakan akomodasi dan aktifitas diving professional yang memanfaatkan wilayah laut Pulau Dua sebagai lokasi diving.



Gambar 2. 2 Akomodasi Pulau Dua

2.2.4 Fasilitas Penunjang

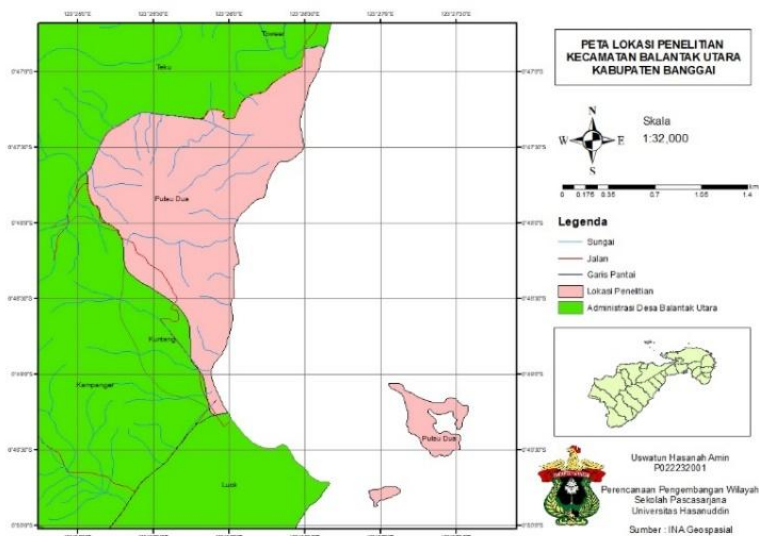
Salah satu kebutuhan dari wisatawan yaitu makanan dan minuman yang tersedia di tempat wisata. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai, terdapat 4 rumah makan dan 1 restaurant yang terdapat di Wisata Pulau Dua.

2.2.5 Prasarana

Pulau tersebut cenderung ditinggalkan dan tidak di kelola dengan baik sehingga fasilitas wisata mengalami kerusakan dan wisatawan tidak dapat menggunakannya. Aktifitas wisata yang dapat dilakukan hanyalah menikmati keindahan pantai, *snorkeling*, *diving* dan *trekking*. Dinas Pariwisata terkait melaporkan bentuk dukungan dari Pemerintah Kabupaten Banggai mengungkapkan infrastruktur pendukung di kawasan wisata bahari pulau dua masih berupa jalan untuk sampai ke puncak bukit dan jalan menuju kawasan. Untuk pembangunan toilet dan air bersih belum dilakukan perbaikan.

2.3 Metode Penelitian

2.3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian



Gambar 2. 3 Peta Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wisata bahari Pulau dua, Kecamatan Balantak Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Pulau Dua sebagai salah satu wilayah di Kabupaten Banggai menyimpan kekayaan bahari dan budaya yang masih minim terekspos dan terkelola. Kedua, berdasarkan data (Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai, 2023), minimnya wisatawan mancanegara yang datang berkunjung di wisata bahari Pulau Dua. Ketiga, belum menjadi fokus utama dalam penelitian pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait penerapan SDGs di sektor pariwisata. Padahal, daerah ini menyimpan keragaman budaya dan potensi alam yang besar namun belum mendapatkan perhatian ilmiah dan kebijakan yang proporsional. Oleh karena itu, Pulau Dua dipandang tepat sebagai lokasi penelitian yang dapat mewakili konteks pariwisata bahari dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia bagian timur.

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 4 bulan, terhitung mulai bulan Mei hingga Agustus 2024. Rincian alokasi waktunya adalah: Bulan 1 : Persiapan penelitian (koordinasi, perizinan, persiapan instrumen), bulan 2:

Pengumpulan data lapangan (wawancara, observasi, dokumentasi) bulan 3 dan 4 : Analisis data, Penyusunan laporan penelitian. Jadwal pelaksanaan dapat berubah disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan di lapangan. Namun, durasi keseluruhan penelitian diperkirakan tidak melebihi 4 bulan.

2.3.2 Jenis Penelitian

Penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data secara langsung ikut terlibat ke lapangan, bertindak sebagai pengamat, membuat kategori, mengamati fenomena (Wekke, 2019:35). Alasan peneliti memilih desain penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan di pulau dua yang akan diamati dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam, penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan secara mendalam mengenai keadaan atau fenomena yang diperoleh dan terjadi di dalam lapangan sehingga mudah dipahami orang lain (Sugiyono, 2023:9). Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada kondisi dilapangan dan mengambil beberapa data dari hasil pengamatan yang dibutuhkan untuk penelitian. Untuk mendukung informasi dari data penelitian memakai dua jenis sumber data, yaitu:

A. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti (Sugiyono, 2023:104). Sumber data ini dihasilkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dikumpulkan langsung dari informan saat penelitian berlangsung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, di mana informan kunci terdiri dari pengelola objek wisata pulau dua. Selain itu, informan lainnya berasal dari masyarakat sekitar, wisatawan dan tokoh masyarakat yang dianggap mampu memberikan penjelasan mengenai kebutuhan data penelitian. Jumlah subjek dalam penelitian ini berkisar antara 10 hingga 20 orang, yang dianggap cukup sebagai sampel untuk penelitian kualitatif ini.

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dalam proses pengumpulan, di mana data tersebut telah ada atau telah dikumpulkan oleh pihak lain atau melalui dokumen yang ada (Sugiyono, 2023:104). Sumber data sekunder mencakup beragam jenis informasi wisata bahari pulau dua yang telah dikumpulkan dalam konteks dan tujuan yang berbeda. Beberapa contohnya meliputi: (1) dokumen yang berkaitan dengan objek wisata pulau dua yang diperoleh dari dinas pariwisata terkait, (2) media cetak maupun media elektronik seperti buku dan sosial media guna mendukung pembahasan informasi primer yang telah diperoleh.

2.3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian untuk dimana tujuan utamanya yaitu mendapatkan data dalam penelitian ini menggunakan tiga Teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

A. Observasi

Dalam menggunakan metode ini, observasi dilakukan secara langsung ketika peneliti mengamati situasi di lokasi penelitian untuk mengetahui dan mencatat kegiatan perkembangan wisata bahari di Pulau Dua, Kabupaten Banggai, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Pengamatan ini bertujuan untuk melengkapi hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya. Menurut Guba dan Lincoln (1988), observasi merupakan suatu kegiatan yang menggunakan pancaindra mulai dari indra penciuman, pendengaran atau penglihatan untuk mendapatkan informasi riil yang diperlukan dalam menjawab permasalahan peneliti (Pahleviannur, 2022:130).

B. Wawancara

Peneliti menggunakan metode wawancara bebas dalam penelitiannya, di mana pertanyaan diajukan secara terbuka dan fleksibel kepada informan. Meskipun demikian, semua pertanyaan tetap terkait dengan data yang dibutuhkan. Informan yang dipilih meliputi masyarakat setempat, penyedia warung makan dan minuman, penyedia perahu, pengelola objek wisata (baik kepala maupun staf), pejabat pemerintah dari tingkat kabupaten yang memiliki pengetahuan tentang pengembangan

wisata bahari pulau dua. Selain itu, penulis juga mewawancarai wisatawan yang berkunjung. Menurut Esterberg (2002), wawancara merupakan interaksi bertukar informasi secara langsung yang dilakukan oleh dua orang untuk menciptakan makna terhadap suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan sebuah permasalahan yang perlu diteliti dan hal yang berkaitan dengan responden (Sugiyono, 2023:114).

C. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumen digunakan sebagai bukti untuk memperkuat hasil dari wawancara yang dilakukan dan hasil dari observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini dokumentasi yang peneliti lakukan dengan melalui pengumpulan dokumen-dokumen dari lapangan seperti foto, video dan data administrasi wisata bahari pulau dua, buku, jurnal, skripsi, internet, dan bahan yang relevan dengan studi ini.

2.3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kondisi aktual yang ada di wisata bahari pulau dua. Metode analisis ini juga digunakan untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti yaitu Pengembangan Wisata Bahari berbasis SDGs di Pulau Dua Kabupaten Banggai. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-memilihnya menjadi sesuatu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2021). Adapun Langkah-langkah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Setelah data primer dan sekunder terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan proses reduksi data melalui pemilahan, pengkategorian, pemfokusan sesuai bidang penelitian, penyusunan dalam satuan analisis, dan perumusan ringkasan yang sistematis (Harahap, 2020). Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan

rinci untuk menjaga keabsahan informasi. Proses reduksi data berarti merangkum, menyeleksi informasi yang pokok, serta memfokuskan pada aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti kondisi eksisting wisata bahari, tantangan, dan peluang pengembangan berbasis SDGs (Sugiyono, 2020).

Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai isu-isu strategis dalam pengembangan wisata bahari di Pulau Dua, serta memudahkan peneliti dalam melakukan analisis lebih lanjut. Reduksi data juga berfungsi sebagai langkah awal dalam menemukan pola, tema, dan keterkaitan antar variabel yang mendukung pencapaian pariwisata berkelanjutan.

Dalam konteks penelitian ini, data yang direduksi meliputi hasil wawancara dengan Pemerintah Desa Pulau Dua, Pokdarwis, masyarakat lokal, dan pengunjung wisata, yang kemudian dipadukan dengan observasi lapangan serta dokumentasi. Data tersebut difokuskan pada aspek ekonomi, sosial serta permasalahan lingkungan yang menjadi indikator dalam pencapaian *Sustainable Development Goals*.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan melalui analisis deskriptif kualitatif dalam bentuk narasi yang menggambarkan kondisi eksisting wisata bahari di Pulau Dua. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi disusun secara sistematis dalam uraian kalimat sehingga mampu menunjukkan hubungan antar kategori ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai keterkaitan antara kondisi lapangan dengan indikator pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam pengembangan pariwisata bahari (Harahap, 2020).

3. Penarikan Kesimpulan

Meskipun pada tahap reduksi data sudah mulai terlihat gambaran kesimpulan sementara, namun sifatnya belum permanen dan masih terbuka untuk tambahan maupun pengurangan sesuai

dengan bukti-bukti lapangan. Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti menginterpretasikan data yang telah diverifikasi dengan hasil observasi dan wawancara sehingga menghasilkan temuan yang akurat, faktual, dan relevan dengan tujuan penelitian. Dalam konteks ini, kesimpulan difokuskan pada strategi pengembangan wisata bahari berbasis SDGs di Pulau Dua yang meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan. Peneliti tetap berhati-hati terhadap potensi bias pribadi dan senantiasa merefleksikan apakah masih diperlukan bukti tambahan untuk memperkuat hasil penelitian yang diperoleh (Abidin dkk, 2010).

2.3.5 Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, data dinyatakan valid atau sah apabila tidak ada perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti (Sugiyono, 2023:183). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan metode triangulasi sumber. Triangulasi adalah kegiatan pengecekan dan membandingkan antara data hasil wawancara maupun observasi dengan berbagai metode, sumber atau teori misalnya dibandingkan antara hasil data dari wawancara dengan hasil data dari dokumen dan hasil data dari observasi yang berhubungan subjek dalam penelitian (Pahleviannur, 2022:155).

Triangulasi sumber, yaitu menggunakan sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama untuk mendapatkan data (Sugiyono, 2023:125). Teknik triangulasi ini peneliti gunakan untuk mengecek keabsahan data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga menghasilkan pengetahuan yang reliabel dengan pengembangan wisata bahari berbasis *Sustainable Development Goals* di Pulau Dua.

2.4 Kerangka Alur Penelitian

Kerangka alur penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 4 Alur penelitian

Sumber : Analisa penulis

2.5 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.5.1 Gambaran Umum Wilayah

Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 adalah Kabupaten Banggai merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Tengah dengan ibu kota di Luwuk. Secara administratif terbagi menjadi 23 kecamatan, 291 desa, dan 46 kelurahan. Luas wilayah daratannya sekitar 9.672,70 km² (14,22% dari luas Provinsi Sulawesi Tengah) dan wilayah laut seluas 20.309,68 km² dengan garis pantai sepanjang 613,25 km. Kabupaten Banggai terletak antara 121° 50' Bujur Timur dan 0° 22' - 2° 41' Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Tomini

- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Peling/ Kabupaten Banggai Kepulauan, Teluk Tolo
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tojo Una-una dan Kabupaten Morowali

Wilayah ini didominasi oleh pegunungan dan perbukitan dengan dataran rendah yang terdapat di kaki pegunungan dan pesisir. Sekitar 40,83% wilayah merupakan lereng dengan kemiringan curam hingga sangat curam (>40%), 22,10% lereng landai sampai agak curam, 17,35% lereng datar sampai landai, dan 19,72% lereng sangat datar. Lahan datar yang terbatas membatasi kawasan budidaya.

Kabupaten Banggai memiliki keanekaragaman morfologi dengan pegunungan, sungai jernih, dan banyak pulau kecil di sekitarnya. Sebagian besar desa berada di ketinggian kurang dari 500 m dengan permukaan tanah didominasi oleh daratan dan perbukitan, sedangkan desa di atas 500 m didominasi oleh perbukitan atau pegunungan.

Kabupaten Banggai dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tanggal 1 April 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan maka secara yuridis wilayah Kabupaten Banggai telah terpisah dengan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kabupaten Banggai kaya akan sumber daya alam, baik dari sektor laut maupun darat. Lautnya berada di pusat segitiga terumbu karang dunia (Kawasan *Wallacea*), menghadirkan keanekaragaman hayati yang tinggi. Potensi sumber daya laut meliputi ikan, udang, mutiara, dan rumput laut. Dari darat terdapat hasil bumi seperti kelapa, sawit, coklat, beras, dan ubi. Di sektor pertambangan terdapat potensi gas, minyak, nikel, dan emas. Sebagian wilayah laut juga ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan.

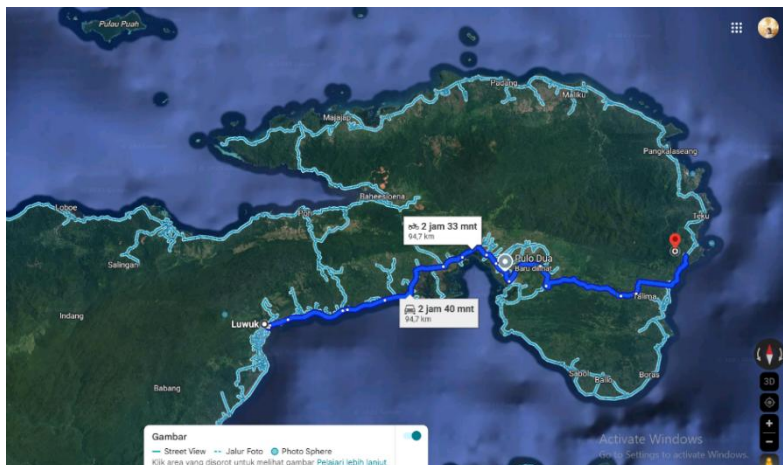
2.5.2 Identifikasi kondisi Wisata Bahari dalam Pencapaian SDGs

2.5.2.1 Letak Lokasi dan Akses Wisata Pulau Dua

Akses menuju Pulau dua kabupaten banggai dapat ditempuh dengan tiga perjalanan. Pertama perjalanan darat dari kota palu dengan

jarak kurang lebih 610km, kedua perjalanan dengan menggunakan transportasi udara dengan durasi 45 menit dan juga dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi laut.

Pulau Dua berada di perairan Kecamatan Balantak Utara, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Jaraknya sekitar 75km dari Kota Luwuk, ibu kota kabupaten, ditempuh dalam 1,5–3 jam darat ke Desa Kampangar seperti yang terlihat pada gambar 2.5, lalu 10–15 menit menyeberang perahu kecil ke pulau tersebut. Pulau ini berupa dua pulau kecil berkontur bukit berbatu atau padang rumput, dengan puncak “Bukit Tandalo” mencapai kemiringan curam $\pm 60\text{--}80^\circ$. Akses ke puncak disediakan anak tangga dan jalur setapak. Masyarakat setempat banyak berasal dari Suku Balantak, dengan dua subsuku Tanoturan dan Dale-Dale. Mata pencaharian utama petani kelapa dan nelayan. Pemerintah daerah menjadikan Pulau Dua sebagai destinasi unggulan (termasuk bagian dari 100 *Calendar of Events Wonderful Indonesia*), namun keberlanjutan pengelolaan masih menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah.



Gambar 2. 5 Jarak tempuh wisata Pulau Dua

Sumber: *Googlemaps*

2.5.2.2 Akomodasi

Pulau Dua di Kabupaten Banggai memiliki potensi wisata bahari yang tinggi, namun dari hasil penelitian, kondisi akomodasi yang tersedia masih belum mendukung prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana dicanangkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dalam konteks SDG SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang

Bertanggung Jawab), keberadaan akomodasi yang ramah lingkungan menjadi prasyarat penting bagi tercapainya keberlanjutan sektor pariwisata.

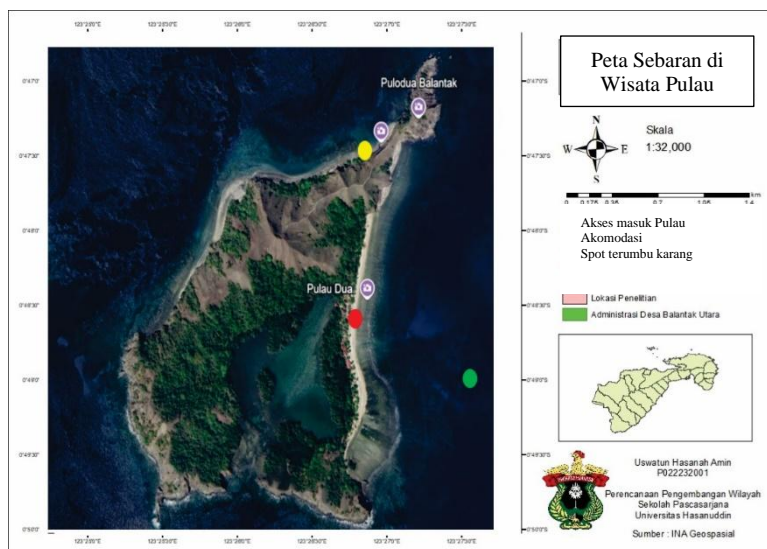
Mengacu pada *GSTC-D* dan temuan Torres-Delgado & Saarinen (2014), indikator keberlanjutan mencakup dimensi lingkungan, ekonomi, sosial, dan kelembagaan. *Tompatika Dive Lodge* sudah memperlihatkan indikator seperti efisiensi energi dan keterlibatan ekonomi lokal, namun akses homestay lokal masih rendah partisipasinya dalam aspek kelembagaan dan inklusi sosial. homestay milik masyarakat setempat yang belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan wisata berkelanjutan. Tidak tersedia fasilitas dasar seperti sanitasi modern, sistem pengelolaan limbah, atau sumber energi yang efisien. Studi Penang *Community-Based Homestay Tourism* (Ramaiah et al., 2025) menyebut perlunya standarisasi homestay dan peningkatan tata kelola agar CBT homestay menjadi model yang sejalan dengan SDGs secara formal dan berkelanjutan Hal ini menunjukkan belum adanya integrasi prinsip *green accommodation* secara menyeluruh seperti yang disarankan oleh UNWTO (2020), yaitu akomodasi yang dibangun dari bahan lokal, hemat energi, dan mendukung ekonomi lokal.



Gambar 2. 6 Akomodasi Pulau Dua
Sumber: Dokumentasi Penulis

2.5.2.3 Objek Wisata

Pulau Dua merupakan salah satu destinasi bahari yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, Pulau Dua menawarkan beragam daya tarik wisata berbasis alam (*natural-based attractions*), namun masih mengalami keterbatasan dalam hal pengelolaan, promosi, dan keberlanjutan yang sejalan dengan prinsip-prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan SDG 14 (Ekosistem Lautan). Dapat di lihat berdasarkan peta sebaran wisata pulau dua



Gambar 2. 7 Peta sebaran di wisata pulau dua

Sumber: *Google earth*

kondisi wisata bahari di lokasi ini dapat dikatakan sangat potensial dari segi daya tarik alam dan keindahan bawah laut. Pulau Dua memiliki daya tarik keindahan bawah laut yang luar biasa, didukung oleh pasir putih, air laut yang jernih, dan keanekaragaman terumbu karang yang tinggi. Keberadaan terumbu karang yang masih sehat serta keragaman hayati bawah laut menjadikan Pulau Dua masuk dalam kawasan *Coral Triangle*, yaitu salah satu wilayah segitiga terumbu karang dunia yang terkenal akan kekayaan biodiversitas lautnya. Hal ini tidak hanya menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik, melainkan juga menarik minat wisatawan mancanegara yang ingin menikmati pengalaman *snorkeling* dan *diving* dengan pemandangan biota laut yang menakjubkan serta suasana

tenang jauh dari keramaian Keindahan dan keunikan Pulau Dua semakin diperkuat dengan pemandangan alam dari puncak bukit di pulau ini, di mana pengunjung dapat menikmati panorama laut luas dan deretan pulau-pulau kecil di sekelilingnya. Dapat di lihat pada gambar. Selain pesona alam, terdapat sekitar 35 spot penyelaman di sekitar Pulau Dua yang siap dieksplorasi lebih lanjut oleh wisatawan, sehingga menambah ragam aktivitas wisata yang dapat dilakukan di kawasan ini. Potensi ini sangat relevan dengan tren global pariwisata berbasis pengalaman (*experience-based tourism*) dan ekowisata (*ecotourism*) yang sedang berkembang.



Gambar 2. 8 Pesona Panorama Pulau Dua

Sumber: soalpalu.com

Namun, di samping potensi besar yang dimiliki, Pulau Dua masih menghadapi beberapa keterbatasan, seperti aksesibilitas ke lokasi yang relatif menantang serta fasilitas penunjang pariwisata yang masih perlu dikembangkan. Permasalahan lain yang dihadapi pada kawasan wisata di kawasan *Coral Triangle* secara umum adalah tantangan pengelolaan pariwisata agar tetap berkelanjutan, seperti perlindungan ekosistem, manajemen limbah, dan edukasi bagi pengunjung serta masyarakat lokal agar daya tarik wisata bahari tetap terjaga di masa depan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jørgensen & McKercher (2021), pengelolaan yang tidak terstruktur dapat mempercepat degradasi lingkungan dan memperburuk daya dukung kawasan wisata. Saat ini, aktivitas wisata di Pulau Dua belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Masyarakat hanya terlibat dalam skala kecil

seperti penyewaan perahu atau menjual makanan ringan secara informal. Ini menandakan belum terciptanya integrasi antara potensi daya tarik wisata dengan pemberdayaan ekonomi lokal, yang merupakan esensi dari SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*).

Berikut adalah daftar tabel mengenai atraksi dan aktivitas wisata yang dapat dilakukan di Pulau Dua:

Tabel 2. 4 Atraksi /Aktivitas Wisata Pulau Dua

No	Jenis Atraksi / Aktivitas	Deskripsi Potensi
1	Keindahan Alam Bahari	Panorama pesisir yang alami, air laut yang jernih, dan pemandangan pulau yang ikonik.
2	Wisata Bawah Laut	Keanekaragaman hayati laut dan terumbu karang yang masih terjaga.
3	Snorkeling & Diving	Kegiatan menyelam di titik-titik penyelaman (spot diving) di sekitar perairan pulau.
4	Trekking & Hiking	Menjelajahi area perbukitan atau daratan pulau untuk menikmati pemandangan dari ketinggian.
5	Wisata Budaya	Adanya potensi festival budaya lokal yang dapat dipadukan dengan wisata alam.
6	Wisata Kuliner	Potensi makanan khas lokal yang dikelola oleh masyarakat dan restoran setempat.
7	Fishing (Memancing)	Aktivitas memancing yang dapat diintegrasikan dengan pengalaman wisata bahari.
8	Camping	Aktivitas berkemah di area pesisir pulau.

Sumber: Analisa Penulis

2.5.2.4 Fasilitas Penunjang

Berdasarkan hasil observasi lapangan mengenai fasilitas penunjang pada wisata bahari Pulau Dua, Kabupaten Banggai, ditemukan bahwa secara umum fasilitas yang tersedia sudah mulai berkembang, meskipun masih terdapat banyak keterbatasan yang perlu mendapatkan perhatian untuk pengembangan ke depan. Fasilitas penunjang yang telah ada di Pulau Dua antara lain warung atau tempat makan yang dikelola oleh masyarakat lokal, serta kehadiran restoran yang khusus melayani tamu yang menginap di *Tompatika Dive Lodge*.



Gambar 2. 9 Restaurant Tompotika Dive Lodge
 Sumber: Sosial Media *Tompotika Dive Lodge*

Studi prioritas menunjukkan bahwa fasilitas kuliner lokal yang diintegrasikan dalam destinasi wisata dapat meningkatkan kepuasan wisatawan sekaligus memberi manfaat ekonomi lokal, sejalan dengan SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) (Bahar et al., 2020). Kondisi Pulau Dua menunjukkan tersedia fasilitas peribadatan yang memadai serta papan informasi wisata yang mendukung orientasi wisatawan. Keberadaan fasilitas tersebut merupakan elemen penting dalam meningkatkan kenyamanan wisatawan dan mempromosikan destinasi secara lebih sistematis. Studi oleh penelitian di Yogyakarta mengindikasikan bahwa infrastruktur pendukung seperti papan informasi dan fasilitas umum memiliki peranan signifikan dalam membentuk kebijakan pariwisata lokal yang selaras dengan standar berkelanjutan seperti GSTC (Muhamad et al., 2025).

Fasilitas Penunjang lainnya seperti toilet umum, tempat sampah terpilah, area parkir, dan pusat informasi wisata masih kurang memadai di kawasan Pulau Dua. Padahal fasilitas semacam ini sangat penting untuk menjamin kenyamanan dan kebersihan destinasi wisata. Berdasarkan studi oleh Delgado et al., (2014), fasilitas wisata berkelanjutan harus mampu mendukung kebutuhan wisatawan tanpa merusak sumber daya lingkungan.

Pulau Dua memiliki media promosi digital maupun offline yang masih minim untuk memperkenalkan kekayaan daya tariknya. Dengan terus berkembangnya digitalisasi membuat wisatawan dapat mengakses informasi apa saja yang ada di pulau dua. Hanya saja masih dikategorikan minim karena dari pihak pengelola dalam hal ini dinas pariwisata pada platform website, media sosial dan lainnya belum secara penuh mempromosikan potensi yang ada di Pulau Dua. Hal ini membuat potensi yang ada tidak terlihat oleh pasar wisatawan yang lebih luas. Berdasarkan studi oleh Lane (2015), promosi berkelanjutan dan

edukatif sangat penting untuk meningkatkan kesadaran wisatawan terhadap nilai konservasi destinasi.

2.5.2.5 Prasarana

Pulau Dua belum memiliki dermaga permanen yang memadai untuk kapal wisatawan atau kapal speed boat, padahal akses menuju pulau mengandalkan transportasi laut. Hal ini berdampak pada risiko keselamatan perahu, kemudahan naik turun penumpang, serta kelancaran operasional wisata. Dalam kerangka koastal *infrastructure planning*, keberadaan dermaga yang aman dan terstandar sangat penting untuk mendukung aksesibilitas dan pengalaman wisata yang berkualitas (Bakogiannis et al., 2021). Tanpa dermaga yang layak, destinasi menghadapi hambatan dalam penyediaan transportasi laut yang aman dan efisien. Berikut ini salah satu gambar 2.10 prasarana dermaga yang perlu adanya perhatian khusus.



Gambar 2. 10 Dermaga Pulau Dua

Sumber: Banggai Info

Walaupun Pulau Dua sudah memiliki jaringan listrik dan telekomunikasi serta toilet umum, ketersediaannya masih sangat terbatas dan tidak tersebar merata di seluruh area wisata. Sanitasi umum tidak mengikuti standar kebersihan dan aksesnya tidak memadai bagi jumlah pengunjung. Studi (Kautsary, 2023) menekankan bahwa akses informasi, toilet, akomodasi, dan fasilitas transportasi merupakan prioritas utama infrastruktur pariwisata laut.

Tidak ada sistem sistem pengelolaan sampah di destinasi masih sangat terbatas. Sampah tidak dipilah dan sebagian besar dibuang atau dibakar secara manual, menimbulkan ancaman terhadap lingkungan laut dan estetika kawasan. Penelitian global menunjukkan bahwa manajemen fasilitas sanitasi dan limbah sangat krusial dalam pariwisata berkelanjutan dan berpengaruh pada kepuasan wisatawan (Mustaqim et al., 2020). Ini relevan dengan SDG 12 (Konsumsi dan

Produksi yang Bertanggung Jawab) dan SDG 14 (Ekosistem Laut) yang menuntut pengelolaan limbah laut dan darat secara berkelanjutan. Dalam praktik terbaik pariwisata, objek wisata seharusnya memiliki sistem pemilahan sampah, penggunaan produk pembersih biodegradable, serta fasilitas pengolahan *grey water*.

Selain fasilitas dasar, Pulau Dua masih kekurangan sarana penunjang seperti signage edukasi, ruang informasi wisata, dan integrasi teknologi seperti peta digital dan sistem manajemen kunjungan real-time juga membatasi pengalaman wisata modern dan inklusif. Penelitian oleh *Journal of Tourism, Sustainability and Well-Being (2024)* menyoroti pentingnya destination management organisations mengadopsi teknologi cerdas untuk memantau kepadatan pengunjung dan memperkuat keamanan destinasi pantai. Ketidakterpenuhinya sarana ini menunjukkan bahwa Pulau Dua masih belum siap menuju pariwisata digital yang berkelanjutan dan adaptif terhadap

No.	Variabel	Hasil Observasi
1	Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Akses jalan menuju lokasi objek wisata masih banyak yang rusak ➢ Kualitas jalan yang kurang baik ➢ Terdapat tiga jalur jalan yang dapat di lalui ➢ Tersedia angkutan umum berupa rental mobil luwuk-balantak Waktu tempuh dari ibukota ke objek wisata ± 2 - 3 jam
2	Akomodasi	Tersedia Cottage dan Aula yang tidak layak pakai, terkecuali di pesisir pulau
3	Daya Tarik	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Memiliki ciri khas berpasir Putih ➢ Memiliki air yang jernih ➢ Memiliki pemandangan bawah laut yang indah ➢ Memiliki 30 Spot konservasi karang
4	Ketersediaan Fasilitas Penunjang	Pihak yang mengelola objek wisata Pulau Dua ini yaitu Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> ➢ Untuk informasi mengenai objek wisata dapat diakses melalui blogspot dan postingan sosial media ➢ Tersedia tempat peribadatan seperti masjid ➢ Tersedia Gazebo & Gerai Makanan
5	Ketersediaan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Tersedia MCK ➢ Tersedia Pembuangan sampah yang tersebar di beberapa titik dan terdapat truk sampah

kebutuhan wisatawan modern. Secara rinci di tampilkan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 2. 5 Kondisi Eksisting Objek Wisata Pulau Dua

Sumber: Hasil olah data 2025

Berdasarkan hasil observasi, yang dapat dilihat rinciannya pada tabel 2.5, bahwa penciptaan lapangan kerja lokal dalam sektor wisata bahari di Pulau Dua masih terbatas. Hal ini tercermin dari tersedianya fasilitas wisata yang memanfaatkan bahan dan produk lokal seperti makanan khas onyop dan

pisang lowe, yang menunjukkan adanya keterkaitan antara sektor pariwisata dengan potensi ekonomi masyarakat setempat. Namun, tingkat keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas wisata masih rendah, dengan presentase tenaga kerja lokal hanya sekitar 0,13%. Kondisi ini berdampak pada belum signifikannya penurunan angka pengangguran sebagaimana ditunjukkan oleh data Badan Pusat Statistik (BPS). Lebih lanjut, peningkatan kapasitas tenaga kerja di bidang pariwisata juga belum merata, karena hanya terdapat sekitar 10–15 orang pekerja yang memiliki sertifikasi resmi. Selain itu, pelatihan bagi pekerja maupun pengelola pariwisata belum berjalan optimal, masih sebatas sosialisasi atau bimbingan teknis yang diselenggarakan pemerintah setempat. Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa pengembangan aspek ekonomi masih memerlukan perhatian serius agar mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Dalam aspek sosial budaya, hasil observasi menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Misalnya, penghargaan terhadap penduduk lokal masih belum terealisasi sesuai indikator. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya lokal juga mengalami penurunan, terlihat dari terhentinya event budaya sejak tahun 2019 akibat ketiadaan regulasi yang mengatur keberlanjutan program tersebut. Meski demikian, terdapat upaya menjaga integritas struktur komunitas sosial melalui keberadaan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), pemerintah desa, dan pihak ketiga seperti *Tompotika Dive Lodge*. Selain itu, masyarakat juga berperan aktif dalam pemeliharaan infrastruktur wisata dengan pengawasan langsung dari pengelola Pulau Dua. Dari sisi kepemilikan, akomodasi seperti homestay sebagian besar dimiliki oleh masyarakat lokal, meskipun terdapat juga aset dari pihak swasta dan fasilitas pemerintah yang kini sudah tidak difungsikan. Sementara itu, ketersediaan informasi masih terbatas; jaringan Telkom sudah tersedia, tetapi pembaruan informasi resmi di website dinas pariwisata belum berjalan. Informasi lebih banyak tersebar melalui media sosial wisatawan, seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Kondisi ini menunjukkan

bahwa aspek sosial budaya membutuhkan revitalisasi kegiatan budaya, penguatan kelembagaan, dan sistem informasi yang lebih terintegrasi.

Dari sisi lingkungan, observasi memperlihatkan bahwa perlindungan ekosistem wisata bahari sudah mendapat perhatian. Upaya pemeliharaan ekosistem darat dan laut dilakukan oleh Dinas Pariwisata bekerja sama dengan Masyarakat Peduli Alam (MPA) dan Yayasan Tompotika Banggai Laut (YTBL). Namun demikian, kawasan Pulau Dua masih memiliki tingkat risiko bencana alam yang tergolong sedang, mengingat lokasinya berdekatan dengan pegunungan yang aliran sungainya bermuara ke laut. Upaya mitigasi bencana juga belum maksimal, karena masih kekurangan peralatan pendeteksi bencana seperti tsunami. Di sisi lain, pengelolaan sampah sudah berjalan dengan adanya fasilitas daur ulang, meskipun praktik penggunaan ulang sampah, baik dari limbah makanan maupun konsumsi wisatawan, belum diterapkan. Hal ini menandakan perlunya peningkatan pengelolaan lingkungan yang lebih komprehensif, terutama dalam mitigasi bencana dan pemanfaatan kembali limbah wisata.

Tabel 2. 6 Hubungan Aspek Keberlanjutan dan Kondisi Eksisting Pulau Dua

Variabel	Sasaran	Indikator	Hasil Observasi
Ekonomi	Penciptaan lapangan kerja lokal	Menggunakan bahan dan di produksi dari lokal	Tersedianya fasilitas wisata yang menggunakan bahan dan di produksi lokal seperti makanan khas (onyop, pisang lowe, dan lainnya)
		Keterlibatan masyarakat lokal	Presentase 0,13% tenaga kerja lokal yang terlibat dalam aktivitas wisata.
		Mampu menurunkan tingkat pengangguran	Belum menurun secara signifikan harus dilihat dari presentase BPS
	Peningkatan kapasitas kualitas pekerja bidang pariwisata	Adanya pekerja bersertifikat di bidang pariwisata	Tidak menyeluruh, hanya terdapat 10-15 orang yang memiliki lisens dalam bidang pariwisata
		Adanya pelatihan bagi pekerja/pengelola pariwisata	Belum optimal dilakukan sekedar sosialisasi/ Bimtek dilakukan oleh pemerintah setempat
Sosial	Kesejahteraan Sosial	Penduduk lokal memiliki penghargaan	Belum tercapainya indikator berikut
		Partisipasi dalam kegiatan budaya lokal, keaslian, warisan budaya	Event budaya lookal yang dilaksanakan berhenti di tahun 2019, tidak adanya

			regulasi lanjutan dari kegiatan tersebut
		Tindakan untuk menjaga integritas struktur komunitas sosial lokal	Pokdarwis dan Pemerintah desa bersama pihak ketiga (tompotika dive lodge)
	Komunitas (partisipasi-organisasi-keterlibatan)	Masyarakat ikut serta dalam perkembangan/pemeliharaan infrastruktur	Masyarakat terlibat dalam pemeliharaan dan perkembangan infrastruktur yang ada tentunya adanya pengawasan langsung dari pengelola wisata pulau dua
		Adanya kepemilikan lokal (homestay/akomodasi lainnya)	Akomodasi di Pulau dua dimiliki oleh Masyarakat lokal dan tompotika dive lodge, adapun aset pemerintah sudah tidak dapat di fungsikan
	Ketersediaan informasi	jenis jaringan yang digunakan untuk promosi	Jaringan Telkom yang terdapat di Pulau Dua
		Jumlah orang akses informasi yang disediakan	Belum adanya pembaharuan di website pengelola dalam hal ini dinas pariwisata terkait. Hanya mendapatkan informasi dari sosial media wisatawan yang pernah berkunjung seperti Instagram, Facebook, dan Tiktok.
Lingkungan	Perlindungan lingkungan secara keseluruhan	Pemeliharaan terhadap ekosistem di sekitar wisata bahari	Dilakukan oleh dinas pariwisata bekerja sama dengan MPA dan YTBL dalam pemeliharaan ekosistem baik yang berada di daratan terkhusus di bawah laut.
		Memiliki tingkat risiko bencana alam yang rendah	Tingkat resiko bencana alam sedang karena dekat dengan pengunungan yang aliran sungainya mengalir ke laut.
		Upaya pelaksanaan mitigasi bencana alam	Belum maksimal di lakukan, masih memerlukan alat untuk mendeteksi jika terjadinya tsunami atau bencana alam lainnya.
	Pengelolaan sampah	Adanya daur ulang sampah yang dilakukan	Telah tersedia fasilitas pengelolaan sampah yang memadai

		Adanya penggunaan ulang sampah	Belum adanya penggunaan ulang sampah baik dari limbah makanan maupun konsumsi wisatawan
--	--	--------------------------------	---

Sumber: Hasil olah data, 2025

2.5.3 Konsep Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengembangan Wisata Bahari Pulau Dua

Dalam konteks pariwisata yang berkelanjutan, wisata bahari sangat berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan dalam segi penerapan ekonomi biru, yang bertujuan untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* serta melindungi ekosistem laut Indonesia sampai tahun 2030. Salah satu pilihan kebijakan dari Bappenas adalah mengintegrasikan Ekonomi Hijau dengan Ekonomi Biru. Dalam hal ini, konsekuensinya adalah Indonesia harus menghentikan sementara semua tindakan eksploitasi yang dapat mempengaruhi keuntungan nasional dan beralih ke eksplorasi. Konsekuensi positif dari langkah ini adalah Indonesia dapat melanjutkan pembangunannya sambil tetap menjaga Konservasi Sumber Daya Alam laut dan mengurangi dampak perubahan iklim, sehingga penerapan konsep berkelanjutan menjadi pilihan alternatif yang menarik.

Secara tidak langsung, pengembangan wisata bahari di Pulau Dua dengan menggunakan konsep pariwisata berkelanjutan telah dilaksanakan secara bertahap.

1. Prinsip Ekonomi (*Multiple Revenue*)

Prinsip *Multiple Revenue* adalah pengembangan wisata bahari untuk meningkatkan daya saing produk wisatanya dilakukan dengan meningkatkan keragaman kegiatan ekonomi sehingga dapat menghasilkan pendapatan berganda. Prinsip ini sejalan dengan sektor manajemen perikanan *alignments in fishermen and fish farms*, yaitu tidak hanya dibekali oleh kemampuan untuk menangkap, membudidayakan, berjualan, tetapi juga diajarkan bagaimana mereka mengembangkan usaha mereka dengan *innovative techniques* sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang baru. Wisata bahari Pulau Dua

menghadirkan banyak peluang untuk mencapai keuntungan maksimal dan mendorong peningkatan pendapatan sehingga kesejahteraan masyarakat ikut meningkat.

a. Menggunakan bahan dan di produksi dari lokal

Masyarakat sekitar wisata bahari Pulau Dua mengolah hasil laut menjadi beberapa produk, misalnya selain dijual sebagai ikan segar dan makanan seafood, tetapi juga diproduksi menjadi ikan asin, dan lainnya. Sesuai dengan informasi Ibu Ani (57 tahun) salah satu pembuat ikan asin dan memiliki warung makan di wisata bahari Pulau Dua yang menyampaikan bahwa:

“Ya selain ikan asin yang kita jual, kita juga memanfaatkan hasil kebun kita mba agar lebih variatif, misalnya dengan mengolah sagu menjadi makanan yang disantap dengan ikan kuah asam kalau orang umumnya biasa kenal dengan papeda, nah kalo kita disini bilanganya onyop, juga pisang lowe mba, itu cemilan khas kita”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang bahwa hasil ikan laut dapat dimanfaatkan menjadi banyak produk dan dapat di padukan dengan makanan lainnya dengan memberikan ciri khas tersendiri yang dapat dipasarkan di wisata bahari Pulau Dua.

b. Keterlibatan masyarakat lokal dan mampu menurunkan tingkat pengangguran

Keterlibatan masyarakat lokal merupakan salah satu pilar utama pariwisata berkelanjutan. Dalam konteks Pulau Dua, masyarakat telah mulai berperan melalui penyediaan homestay, warung makan, jasa transportasi laut, serta pemandu wisata selam. Meskipun kontribusi ini masih terbatas, keterlibatan masyarakat memberikan peluang untuk memperluas manfaat ekonomi dari sektor pariwisata. Menurut Scheyvens & Hughes (2019), partisipasi aktif masyarakat dalam pariwisata bukan hanya meningkatkan rasa kepemilikan terhadap destinasi, tetapi juga mendorong distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata. Sesuai dengan pernyataan Ibu Ila salah satu nelayan di kawasan wisata bahari Pulau Dua sebagai berikut:

“Penghasilan nelayan itu sulit di tebak mba, soalnya kan kalo nelayan itu tergantung musim dan cuaca bisa saja badai atau hujan mba. Kalo lagi dapat banyak bisa 100 ribu sampai 300 ribu atau lebih, tapi kalo dapat sedikit paling 50 ribu”.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Ila penghasilan nelayan tidak menentu yaitu antara 50 ribu sampai 300 ribu tergantung faktor cuaca. Namun, dilihat dari potensi wisata bahari Pulau Dua selalu menjadi sorotan bagi wisatawan.



Gambar 2. 11 wawancara nelayan di pulau dua

Sumber: Dokumentasi penulis, 06 Juni 2025

Selain memiliki pemandangan laut yang indah, wisata bahari Pulau Dua juga pernah mengadakan berbagai kegiatan seperti festival yang masuk dalam kalender event 100. Adanya acara-acara tersebut membuat kondisi pendapatan masyarakat sekitar yang melakukan kegiatan ekonomi terbantu. Seperti pernyataan Ibu Vita salah satu pengusaha dalam ruang lingkup F&B Service yang ada di wisata bahari Pulau Dua yang menyatakan bahwa:

“Kalo lagi rame lumayan mba satu hari saya bisa sampe satu juta, apalagi kalo hari sabtu minggu atau ada acara di sini alhamdulillah banyak yang ke pantai jadi dapat penghasilan lumayan”.



Gambar 2. 12 Wawancara bersama pelaku UMKM

Sumber: Dokumentasi penulis, 20 Juni 2025

Berdasarkan hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa wisata bahari Pulau Dua memberikan peluang bagi masyarakat agar pendapatan bertambah.

Kehadiran pariwisata bahari di Pulau Dua membuka lapangan kerja baru, baik secara langsung (pemandu wisata, pengelola homestay, penyedia makanan dan transportasi) maupun tidak langsung (kerajinan tangan, produksi makanan lokal, dan usaha kecil lainnya). Saat ini tingkat keterlibatan masih rendah, hanya sekitar 0,13% tenaga kerja lokal yang benar-benar terlibat, namun potensi penyerapan tenaga kerja sangat besar bila pengelolaan diperkuat. UNWTO (2020) menyatakan bahwa sektor pariwisata mampu menyerap 1 dari 10 lapangan kerja global, dan destinasi yang mengembangkan *community-based tourism* (CBT) terbukti lebih efektif dalam mengurangi pengangguran lokal. Sesuai yang di sampaikan Bapak Imran (46 Tahun) yang menyatakan bahwa:

“Kita masih minim mba disini untuk penyedia akomodasi, pemandu wisata dari masyarakat lokal, penyedia makanan dan lainnya, ya walaupun akses ke pulau dua mudah untuk di jangkau tapi untuk kebutuhan wisatawan di destinasi ini masih terbatas. Ini saja untuk akomodasi hanya beberapa saja yang menyediakan mba seperti tompotika dive lodge, oceana, yang dimana semuanya pihak swasta ya keuntungannya bagi mereka. Adapun masyarakat yg diperdayakan ½ orang saja yang menjadi chef dan tukang bersih bersih, tentunya tidak dirasakan”.

Jika masyarakat Pulau Dua diberikan pelatihan keterampilan (hospitality, guiding, pengelolaan usaha wisata), maka tingkat keterlibatan dapat meningkat signifikan. Hal ini akan menurunkan tingkat pengangguran sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pesisir. Penelitian oleh Dodds & Holmes (2022) menegaskan bahwa peningkatan kapasitas SDM lokal dalam ekowisata berhubungan langsung dengan penurunan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, penguatan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata bahari di Pulau Dua berkontribusi langsung pada SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*).

Dari segi peningkatan kapasitas dan kualitas dibidang pariwisata ini sangat di harapkan oleh masyarakat setempat, berdasarkan pernyataan Bapak Imran (46 Tahun) :

“Sukanya ada pendampingan dari dinas menyangkut cedramata, menyangkut kuliner, kemarin pernah dilakukan bimtek homestay, tapi hari ini juga sudah tidak difungsikan kembali, karena tidak adanya controlling dan evaluasi”.

Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan wisata bahari Pulau Dua merupakan kunci untuk menurunkan tingkat pengangguran sekaligus mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Namun, kondisi saat ini masih menunjukkan keterlibatan yang rendah, sehingga diperlukan strategi pelatihan, pemberdayaan ekonomi, dengan dilakukan kontrol dan evaluasi oleh dinas terkait agar potensi wisata bahari dapat memberikan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas.

2. Prinsip Sosial (*social inclusiveness*)

Dampak Pariwisata terhadap situasi sosial dan budaya masyarakat lokal tidak boleh di kesampingkan. Pendekatan keberlanjutan dalam pariwisata menawarkan lingkungan yang lebih baik untuk masyarakat dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dengan menempatkan budaya lokal sebagai bagian atau bahkan menjadi inti dari produk pariwisata.

Prinsip kepedulian sosial adalah kegiatan wisata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sehingga peran dan partisipasi setiap pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar program memberikan nilai tambah terhadap penyerapan tenaga kerja. Sektor manajemen perikanan yaitu *research and development* merupakan kegiatan dalam upaya mencari jalan keluar berupa innovative techniques yang dilakukan dengan terbuka, sehingga semua orang dapat mengaplikasikan inovasinya untuk menunjang perekonomian mereka sekaligus melestarikan ekosistem dan lingkungan.

Prinsip kepedulian sosial ini dalam pengembangan wisata pulau dua selalu melibatkan masyarakat, pemerintah dan pihak ketiga dalam hal ini

Yayasan YTBL agar terciptanya program kemitraan atau kelompok kemasyarakatan yang efektif.

a. Terciptanya Program Kemitraan di Dalam Masyarakat

Di area wisata bahari Pulau Dua terdapat beberapa komunitas yang ikut terlibat dalam pengembangan wisata yang dibentuk untuk menaungi aspirasi nelayan dan para pelaku ekonomi serta membantu mengatasi kendala-kendala yang terjadi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Chandra (42 Tahun) selaku kepala bagian destinasi dinas pariwisata kabupaten banggai sebagai berikut:

“Disini kan ada Lembaga swadaya masyarakat yaitu Yayasan tompotika biodiversity lestari, Jadi kita sharing dan adakan sosialisasi dengan para operator wisata, masyarakat dan pemerintah desa baik mengenai kebersihan, aturan, dan himbauan-himbauan lain yang bertujuan untuk menjaga dan mengontrol kondisi wisata bahari Pulau Dua”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Chandra Komunitas tersebut membantu dan memudahkan pihak pengelola dalam memberikan atau mengadakan sosialisasi kepada para onkum yang berada di kawasan wisata dan bertujuan untuk menjaga serta mengontrol kondisi wisata bahari Pulau Dua .

b. Partisipasi dalam kegiatan budaya lokal dan Kerjasama komunitas

Masyarakat Pulau Dua sebelumnya aktif dalam event budaya lokal yang berfungsi sebagai sarana pelestarian warisan tradisi sekaligus daya tarik wisata. Namun, kegiatan budaya ini berhenti sejak 2019 tanpa adanya regulasi atau dukungan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi yang belum dioptimalkan dalam pariwisata berbasis budaya. Richards (2020) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam festival dan tradisi lokal dapat memperkuat identitas budaya sekaligus meningkatkan daya tarik wisata berkelanjutan. Berdasarkan pernyataan Bapak Chandra (42 Tahun) :

“kami sempat mengadakan event dan itu memang masuk dalam kalender event mba, hanya saja sekarang dinas memilih fokus dalam pelestarian ekosistem bawah lautnya, jadi untuk event mungkin akan di selenggarakan lagi mulai tahun depan”.

Selain itu, untuk keamanan wisata juga melibatkan banyak komunitas karena wisata bahari Pulau Dua terletak dekat dengan kawasan perusahaan. Sesuai dengan pernyataan Bapak chandra selaku penanggung jawab wisata bahari Pulau Dua bahwa:

“Untuk keamanan kita bekerjasama dengan keamanan sekitar, ada Patroli dilakukan perminggu 2 kali itu dari wilayah ujung perbatasan kec bualemo dan balantak utara, dan sejauh ini aman mba soalnya sudah ada kesadaran masyarakat bahwa pulau dua memiliki potensi keindahan bawah lautnya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak chandra, wisata bahari Pulau Dua masuk di zona konservasi sehingga memerlukan penjagaan keamanan yang ketat. Dalam pengembangan wisata bahari Pulau Dua bentuk solidaritas sosial melalui kegiatan gotong royong dan kerja sama komunitas, misalnya dalam pengawasan kawasan wisata dan pengelolaan sarana umum. Menurut Bello et al. (2018), keberlanjutan sosial dalam pariwisata harus menjamin bahwa perkembangan destinasi tidak merusak norma, nilai, dan hubungan antaranggota komunitas.

c. Keikutsertaan masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur dan adanya kepemilikan lokal akomodasi

Masyarakat Pulau Dua juga berperan dalam pemeliharaan infrastruktur wisata, seperti jalur akses, papan informasi, dan fasilitas umum sederhana. Partisipasi ini menunjukkan adanya bentuk *co management* antara masyarakat dan pemerintah, meskipun skalanya masih terbatas. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Imran (46 Tahun): “untuk jalur aksesnya masih perlu pemeliharaan lanjutan mba, papan informasi yang tersedia juga tidak terlalu jelas, ini juga yang menjadi point pengajuan kita ke dinas untuk lebih memperhatikan pemeliharaan infrasturktur yang ada”.

Berdasarkan pernyataan diatas sangat diperlukan adanya pemelihataan infrastruktur yang dapat meningkatkan rasa memiliki dengan adanya penekanan partisipasi masyarakat sejalan dengan Studi Jamal & Stronza (2021) akan menurunkan biaya perawatan jangka Panjang sekaligus memudahkan wisatawan.

Beberapa masyarakat Pulau Dua telah mengembangkan homestay sebagai bentuk akomodasi berbasis komunitas. Meskipun jumlahnya terbatas, keberadaan homestay ini menegaskan adanya kepemilikan lokal yang mendukung model *community-based tourism* (CBT). Ibu Anti (55 Tahun) menyampaikan bahwa:

“alhamdulillah kami sudah memiliki fasilitas akomodasi disini mba, ya walaupun belum banyak tapi, sudah bisa memenuhi kebutuhan wisatawan, kebetulan kami ada 3 bungalow yang dimiliki masyarakat setempat dan 2 ecolodge yang dimiliki oleh pihak swasta”.

Temuan ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada investor besar seperti Tompotika Dive Lodge dan Oceana Dive Lodge, tetapi juga terdistribusi ke masyarakat lokal. Menurut Scheyvens (2019), kepemilikan lokal atas fasilitas wisata adalah salah satu indikator utama keberlanjutan sosial-ekonomi pariwisata.

d. Ketersediaan Informasi

Akses informasi sangat dibutuhkan oleh wisatawan yang berkunjung dan akan berkunjung, informasi yang tersedia di destinasi berperan penting dalam edukasi wisatawan, mulai dari tata tertib kunjungan, konservasi lingkungan, hingga pengenalan budaya lokal. Dalam penyampaian Bapak Chandra bahwa:

“kami sudah ada website mba, hanya saja masih perlu di perbaharui Kembali, tapi kami juga terbantu dengan website yang dimiliki oleh tompotika dive lodge disana sudah lengkap dengan berbagai penawaran paket yang bisa diambil oleh wisatawan mba”.

Berdasarkan pernyataan diatas masih diperlukan adanya sistem yang dimiliki oleh pengelola pulau dua dalam hal ini dinas pariwisata kabupaten banggai sehingga memudahkan wisatawan untuk mengetahui informasi apa saja yang harus di lakukan sebelum mengunjungi destinasi wisata bahari pulau dua tersebut. Agar dapat sejalan dengan yang di kemukakan oleh UNWTO (2021) bahwa ketersediaan informasi yang transparan dan mudah diakses meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan serta mendukung tujuan keberlanjutan.

3. Prinsip Lingkungan

a. Perlindungan lingkungan secara keseluruhan

Pengembangan destinasi wisata berupaya dalam pemanfaatan dan menggarap potensi alam dan budaya yang masih asli, serta merupakan industri pariwisata yang cenderung berkembang dengan pesat seiring dengan peningkatan minat masyarakat untuk menikmati alam lingkungannya, kemajuan dan kemudahan akses mencapai lokasi objek wisata serta untuk meningkatkan pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat. Potensi sumber daya alam sebagai asset berupa flora, fauna, ekosistem, fenomena alam dan kehidupan budaya masyarakat yang sangat unik, khas dan orsinil menjadi daya Tarik sebagai objek wisata. Pulau Dua memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi karena masuk dalam kawasan Coral Triangle, sehingga keberlanjutan pariwisata sangat bergantung pada konservasi ekosistem laut dan pesisir. Upaya perlindungan sudah dilakukan melalui kerja sama masyarakat, pemerintah daerah, dan Yayasan *Tompatika Dive Lodge* yang menginisiasi kegiatan konservasi. Berdasarkan pernyataan Ibu Caca salah satu diver yaitu :

“Pulau dua sangat luar biasa untuk keindahan bawah lautnya, terdapat banyak spot yang memanjakan mata, saya sangat tertarik untuk diving lagi untuk melihat semua spot yang ada di pulau dua”.

Temuan ini menunjukkan bahwa terdapat minat berkelanjutan dari pengalaman yang dirasakan oleh wisatawan sehingga menjadi kekuatan bagi pengelola untuk tetap mempertahankan kelestarian produk bawah lautnya. Lopes et al. (2021) dalam *Ocean & Coastal Management* menekankan bahwa pariwisata pesisir harus mengintegrasikan konservasi ekologi dengan manajemen destinasi agar keberlanjutan jangka panjang tercapai. Hal ini mendukung SDG 14 (*Life Below Water*).

Namun ekosistem lingkungan alam yang menjadi daya tarik, juga potensial dan sensitive untuk mudah dirusak apabila di dalam pelaksanaan pengelolaannya tidak mengacu pada aturan dan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan yang harus diterapkan.

Apabila ditinjau dari alat menangkap ikan di kawasan wisata bahari Pulau Dua mayoritas menggunakan alat yang tidak membahayakan dan memberikan dampak buruk terhadap ekosistem. Namun, apabila dilihat dari adanya jalur lalu lintas kapal pengangkut galian c menyebabkan

terjadinya pencemaran lingkungan laut yang mengakibatkan rusaknya ekosistem dalam jangka 5 tahun kedepan. Dalam pengembangan wisata bahari Pulau Dua , pihak pengelola selalu melakukan pengawasan dan pengontrolan yang ketat agar tidak merusak ekosistem yang ada. Karena dengan adanya limbah yang dihasilkan oleh pengerukan pasir tersebut selain mencemari lingkungan laut, juga mengganggu ekosistem laut. Sesuai dengan pernyataan Bapak Rasno salah satu nelayan di Pulau Dua yang menyatakan bahwa:

“Aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dari pengerukan pasir dengan angkutan kapal tengker itu yang membuat kita agak sulit mba untuk menjaga dari segi kelestarian lingkungan. Apalagi jaraknya tidak begitu jauh dengan spot karang yang ada, ketakutan kita 10 tahun kedepan kalau tidak ada tindak lanjut untuk konservasi bawah laut pasti bakalan hancur habitat laut mba”.

Selain mencemari lingkungan dan berdampak pada hasil tangkapan nelayan. Selain permasalahan yang disebabkan oleh kapal pengangkut galian c. Pulau Dua masih minim dalam pelestarian lingkungan sehingga banyak sampah yang berada di kawasan wisata bahari Pulau Dua yang apabila diabaikan dapat merusak ekosistem laut. Seperti yang disampaikan Bapak Imran (46 Tahun) selaku Kepala Desa Pulau Dua bahwa:

“Kita selalu mengutamakan keindahan dan kebersihan laut mba. Tapi memang limbah sampah di Pulau Dua kalau bukan kesadaran dari wisatawan atau masyarakat juga tetap tidak bisa di kendalikan. Sehingga kita ada program disini untuk menyadarkan masyarakat setempat dalam menjaga keindahan wisata pulau dua ini dengan adanya jadwal pembersihan pulau dua di 2 kali dalam seminggu”.

Dengan adanya pencemaran-pencemaran pada kawasan wisata bahari Pulau Dua , tentu memungkinkan terjadinya kerusakan ekosistem yang berdampak pada penghasilan masyarakat sekitar yang memanfaatkan sumber daya laut di wisata bahari Pulau Dua. Sehingga pihak pengelola selalu mengutamakan kebersihan dan keindahan laut agar pencemaran-pencemaran tersebut tidak menjadi masalah yang besar.

Kawasan wisata alam selalu menjadi peluang yang dapat menciptakan pengembangan pemanfaatan dari potensi daya tarik alam

lingkungan dan budaya. Akan tetapi tantangan juga tetap timbul dari penurunan kualitas potensi daya tarik alam lingkungan dan budaya yang sangat mengancam potensi bagi keberlangsungan dan keberlanjutan pengembangan pariwisata.

b. Pengelolaan sampah

Melalui proses produksi menghasilkan produk yang bersih, dimana setiap ekstraksi atau penggunaan sumber daya alam selalu menjadikan limbah sebagai bahan material bagi produksi lainnya sehingga dapat mendatangkan nilai ekonomis. Dalam sektor manajemen perikanan terdapat sektor yang selaras dengan prinsip ini yaitu *ecosystem and environment sustainability*, yaitu segala bentuk tindakan yang mengancam kestabilan laut harus diganti dengan tindakan yang ramah lingkungan untuk menjamin eksistensi dari produk-produk hasil laut berkelanjutan.

Tanpa limbah (*zero waste*) dapat dilakukan dengan mengolah kembali limbah menjadi produk yang bermanfaat tanpa menghasilkan polusi udara atau merusak tanah misalnya limbah tidak dibakar, tidak dibuang ke dalam tanah, air, atau kawasan pesisir yang bisa mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan. Prinsip ini difokuskan terhadap keadaan sampah atau limbah pada wisata dan kegiatan perekonomian di wisata bahari Pulau Dua .

Meskipun saat ini keadaan sampah di wisata bahari Pulau Dua sudah lebih baik daripada sebelumnya, namun hasil observasi peneliti di dapatkan masih ada beberapa masyarakat baik dari kalangan pelaku ekonomi maupun wisatawan yang secara sembarangan membuang sampah di sekitar area pantai. Diperkuat oleh pernyataan Mba Eca (26 Tahun) salah satu wisatawan asal Malang yang menyatakan bahwa:

“Kalo dilihat dari fasilitasnya sih sudah baik ya mba sekarang banyak warung dan gazebo buat istirahat di pesisir, tapi untuk kebersihan di Pulaunya itu mungkin lebih ditingkatkan lagi perlu di renovasi kembali gazebo, toilet dan ketersediaan tempat sampah disana, agar aktivitas wisatawan bukan hanya photo saja tetapi bisa melakukan aktivitas berenang dan menikmati makanan khas Pulau Dua”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat bahwa kondisi kebersihan dan sampah di wisata bahari Pulau Dua masih perlu ditingkatkan dan diperhatikan. Meskipun memiliki daya tarik pantai yang bagus namun

apabila masih banyak sampah dapat mempengaruhi citra dari wisata bahari Pulau Dua yang terkenal pantainya yang indah.



Gambar 2. 13 Kondisi Sampah di Wisata Bahari Pulau Dua

Sumber: Dokumentasi Penulis, 13 Juni 2025

Berdasarkan Gambar 4.6 terlihat bahwa kondisi Wisata bahari Pulau Dua masih banyak sampah baik di kawasan wisata maupun pesisir pantai. Upaya lain yang dilakukan pihak pengelola pantai yaitu menggerakkan masyarakat untuk selalu memperhatikan kebersihan dan juga mengingatkan kepada wisatawan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Sebagai upaya membantu pengurangan volume sampah yang dihasilkan di Kabupaten Banggai seharusnya semua masyarakat sadar akan pentingnya menjaga kebersihan dan bahaya dari sampah, khususnya Wisata bahari Pulau Dua untuk mengelola sampah menjadi produk yang bernilai ekonomi sehingga selain meningkatkan pendapatan juga dapat membuka peluang pekerjaan untuk masyarakat sekitar.

Mengolah limbah menjadi produk baru yang ekonomis di wisata bahari Pulau Dua secara khusus belum ada pengolahan sampah dan limbah. Namun, beberapa masyarakat sekitar memanfaatkan produksi alam untuk kegiatan ekonomi seperti memanfaatkan batok kelapa yang berceceran di pesisir pantai untuk dijadikan kerajinan seperti gelas, gantungan kunci, asbak, tempat tisu, hiasan dinding, dan sebagainya. Namun, seperti pemanfaatan hasil laut belum dilakukan di Pulau Dua ini. Seperti yang di informasikan oleh Pak Akbar (35 Tahun) yang mengatakan bahwa :

“Kami disini belum memanfaatkan limbah untuk diolah menjadi produk yang bisa dijualkan. Karena sampah plastik yang ada bersama sampah lainnya ya nanti langsung di angkut sama petugas kebersihan mba. Jadi sampah plastiknya ngga dibuat kerajinan apa-apa, hanya ada 1 pengrajin saja itupun membuat kerajinan dari batok kelapa dan itu ide dan kemampuan sendiri dengan melihat peluang yang ada, belum adanya pelatihan yang dilakukan, katanya sih tahun ini akan ada bimbingan atau pembinaan terkait hal tersebut”.

Hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa belum sepenuhnya pelaku kegiatan ekonomi di wisata bahari Pulau Dua memanfaatkan limbah agar menghasilkan nilai ekonomi. Padahal sampah dan limbah dapat mencemari lingkungan dan akibat bau yang tidak sedap dapat mendatangkan penyakit.

2.6 Pariwisata Berkelanjutan dalam mewujudkan Sustainable Development Goals pada pengembangan wisata bahari di Pulau Dua

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang disepakati bersama dengan melibatkan berbagai stakeholder, mencakup 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator pembangunan yang ditargetkan tercapai pada tahun 2030. Konsep pembangunan berkelanjutan mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara seimbang antara aspek pemanfaatan dan pelestarian lingkungan, sehingga mampu mendukung pencapaian SDGs secara bertahap. Dalam konteks Indonesia, pemerintah menekankan pentingnya keberlanjutan sektor kelautan dan pariwisata bahari sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.

Pulau Dua di Kabupaten Banggai merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dengan pendekatan pariwisata berkelanjutan. Selain menyuguhkan keindahan bawah laut, pantai berpasir putih, dan ekosistem terumbu karang yang menjadi bagian dari *Coral Triangle*, kawasan ini juga menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, masyarakat sekitar perlu diberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan agar pemanfaatan potensi wisata bahari dapat dilakukan secara efisien dan tidak berlebihan, sehingga tetap menjaga keseimbangan ekologi.

Dalam pengembangannya, wisata bahari Pulau Dua harus selalu mengutamakan kelestarian ekosistem laut dan lingkungan sekitarnya. Hal ini

sejalan dengan misi pariwisata berkelanjutan yang bertujuan tidak hanya meningkatkan aspek ekonomi, tetapi juga menyelesaikan persoalan sosial dan lingkungan di kawasan destinasi. Dengan demikian, pengembangan wisata berbasis pariwisata berkelanjutan di Pulau Dua diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, memperkuat integrasi sosial, serta menjaga keberlanjutan lingkungan.

Tabel 2. 7 Hubungan Indikator dengan *Sustainable Development Goals*

Prinsip	Indikator	Tujuan SDGs
Ekonomi	Menggunakan Bahan dan di Produksi Lokal	1 (Tanpa Kemiskinan)
	Keterlibatan Masyarakat lokal dan Mampu Menurunkan Tingkat Pengangguran	8 (Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi)
Sosial	Terciptanya Program Kemitraan di dalam Masyarakat	13 (Penanganan perubahan iklim)
	Partisipasi dalam Kegiatan Budaya Lokal dan Kerjasama Komunitas	9 (Industri, Inovasi dan Infrastruktur)
	Keikutsertaan Masyarakat dalam Pemeliharaan Infrastruktur dan Adanya Kepemilikan Lokal Akomodasi	9 (Industri, Inovasi dan Infrastruktur)
	Ketersediaan Informasi	8 (Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi)
Lingkungan	Perlindungan Lingkungan Secara Keseluruhan	14 Terjaganya Ekosistem Kelautan
	Pengelolaan Sampah	12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab)

Sumber: Data sekunder

Tabel 2.7 diatas menjelaskan bahwa ada 5 tujuan *Sustainable Development Goals* yang sejalan dengan konsep Pariwisata Berkelanjutan melalui pendekatan indikator dan tujuan di dalam pengembangan wisata bahari Pulau Dua. Indikator pertama yaitu dari aspek ekonomi mengacu pada indikator “menggunakan bahan diproduksi lokal” dan “keterlibatan masyarakat lokal” sebagaimana wawancara

dengan pedagang lokal mengungkapkan bahwa bahan makanan khas Pulau Dua berasal dari sumber setempat. Misalnya, “sagu diolah menjadi papeda (onyop) dan pisang lowe” sebagai hidangan ciri khas Pulau Dua. Penggunaan bahan lokal semacam ini sesuai dengan pedoman keberlanjutan akomodasi (WWF, 2024) yang menganjurkan prioritas penggunaan produk lokal untuk mengurangi jejak karbon. Dengan demikian, Pulau Dua telah memanfaatkan produk pertanian lokal untuk mendukung usaha kuliner wisata, walaupun belum optimal dalam skala luas.

Secara ekonomi, keterlibatan masyarakat setempat masih rendah. Data lapangan menunjukkan hanya sekitar 0,13% tenaga kerja lokal terlibat langsung dalam sektor pariwisata misalnya. penyewaan perahu atau warung makan. Hal ini jauh di bawah potensi pariwisata pada penciptaan lapangan kerja. Menurut *World Travel & Tourism Council* (2024), sektor pariwisata global mendukung kurang lebih 1 dari 10 pekerjaan di dunia, sementara UNWTO/UNDP (2018) menekankan bahwa perusahaan akomodasi idealnya menciptakan tautan dengan rantai nilai lokal, membuka lapangan kerja, dan membeli produk setempat. Saat ini, sebagian besar keuntungan pariwisata Pulau Dua masih dinikmati investor besar *Tompotika Dive Lodge*, sedangkan masyarakat hanya terlibat sebagai staf terbatas. Sebagaimana disampaikan Bapak Imran (Kades Pulau Dua):

“penyedia akomodasi semuanya pihak swasta mba masyarakat yang diberdayakan setengah orang saja, ada beberapa masyarakat kami yang sudah mulai membangun karena melihat banyak kebutuhan, akan tetapi jumlahnya masih terbatas juga mba”.

Kondisi ini menunjukkan belum terpenuhinya secara penuh esensi SDGs 1 dan 8 mengenai tujuan tanpa kemiskinan dan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dalam distribusi manfaat ekonom. Upaya penguatan CBT (*Community Based Tourism*) dapat meningkatkan dampak ekonomi lokal. Studi menunjukkan model pariwisata berbasis masyarakat cenderung lebih efektif mengurangi pengangguran lokal. Untuk itu, diperlukan pelatihan keterampilan hotel, pemanduan, pengelolaan usaha bagi penduduk Pulau Dua, agar kemampuan mereka masuk ke pasar tenaga kerja pariwisata meningkat. Peningkatan kapasitas SDM lokal berhubungan langsung dengan penurunan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan (Dodds & Holmes, 2022). Dengan strategi pemberdayaan ekonomi dan pelatihan, keterlibatan penduduk setempat akan naik dan sektor wisata bahari Pulau Dua dapat berkontribusi lebih besar kepada SDGs 1 dan 8.



Gambar 2. 14 Tujuan *Sustainable Development Goals*

Sumber: <https://www.sdgs.bappenas.go.id>

Indikator kedua yaitu indikator sosial yang menempatkan “*program kemitraan di masyarakat*” terkait SDG 13, serta “kegiatan budaya lokal, kepemilikan akomodasi lokal, dan ketersediaan informasi” terkait SDG 9 dan 8. Di Pulau Dua, keberadaan lembaga kemitraan menjadi kunci dalam melibatkan masyarakat. Misalnya Yayasan Tompotika Biodiversity Lestari dan kelompok nelayan lokal secara aktif mengadakan sosialisasi kebersihan, aturan, dan konservasi lingkungan dengan penduduk dan pengelola destinasi. Bapak Chandra (42 Tahun) menyatakan:

“kita ada LSM dan biasanya kita sharing dengan adakan sosialisasi dengan para operator wisata, masyarakat dan pemerintah desa untuk menjaga dan mengontrol kondisi wisata bahari Pulau Dua”.

Kolaborasi semacam ini memfasilitasi partisipasi warga dalam pengawasan dan pelestarian destinasi, sesuai prinsip pariwisata inklusif GSTC yang mendorong dukungan perusahaan pariwisata terhadap inisiatif komunitas lokal. Berdasarkan wawancara, kemitraan lintas sektor tersebut membantu pengelola untuk melakukan edukasi dan komunikasi secara langsung kepada masyarakat demi menjaga keberlanjutan sosial-ekonomi Pulau Dua.

Partisipasi budaya lokal juga menambah nilai pariwisata. Sebelumnya Pulau Dua rutin mengadakan festival budaya sebagai atraksi sekaligus pelestarian tradisi, namun kegiatan tersebut terhenti sejak 2019. Hal ini menunjukkan potensi budaya yang belum optimal. Bapak Alwi (50 Tahun) mengungkapkan:

“kami sempat mengadakan event festival pulau dua hanya saja sekarang dinas memilih fokus dalam pelestarian ekosistem bawah lautnya, jadi untuk event mungkin akan diselenggarakan lagi mulai tahun depan”.

Literatur menegaskan bahwa festival dan tradisi lokal memperkuat identitas budaya sekaligus menarik minat wisata berkelanjutan (Richards, 2020). Kembalinya kegiatan budaya lokal diharapkan memperluas manfaat ekonomi dan sosial

pariwisata, selaras dengan tujuan SDG 9 (Inovasi dan Infrastruktur) dan SDG 13 (Kesadaran Iklim melalui partisipasi masyarakat).



Gambar 2. 15 Tujuan 13 dan 9 Sustainable Development Goals

Sumber: <https://www.sdgs.bappenas.go.id>

Secara kelembagaan, masyarakat setempat mulai berperan dalam pemeliharaan infrastruktur dasar destinasi. Misalnya, warga secara berkala ikut kegiatan gotong royong membersihkan pantai dan patroli keamanan wisata, serta mengusulkan perbaikan fasilitas publik kepada pemerintah. Bapak Chandra menyatakan, masyarakat sadar akan kewajiban menjaga Pulau Dua di zona konservasi yang ketat, sehingga terbentuk sistem pengawasan bersama. Di sisi akomodasi, sebagian penduduk telah mengembangkan homestay komunitas seperti yang di sampaikan Ibu Anti:

“ada 3 bungalow milik masyarakat setempat di Pulau Dua, ya walaupun masih terbatas, tapi sudah bisa memenuhi kebutuhan wisatawan yang berkunjung mba”.

Temuan ini menunjukkan manfaat ekonomi tidak hanya terpusat pada investor besar, tetapi juga mulai dinikmati masyarakat lokal. Hal ini konsisten dengan Scheyvens (2019) yang menyebut kepemilikan lokal atas fasilitas pariwisata sebagai indikator utama keberlanjutan sosial-ekonomi.

Ketersediaan informasi publik juga penting. Menurut wawancara, pengelola destinasi telah menyediakan situs web dan media sosial untuk Pulau Dua, namun masih perlu diperbarui dan dikelola dengan lebih serius. Bapak Chandra menyebut,

“kami sudah ada website dinas mba, tetapi masih perlu diperbaharui kembali sistemnya, kebetulan juga terbantu dengan adanya website yayasan, jadi wisatawan bisa mengunjungi website tersebut”.

Kekurangan komunikasi publik ini menghambat akses wisatawan terhadap informasi prakeberangkatan dan pedoman konservasi destinasi. Seharusnya pengelola dalam hal ini Dinas Pariwisata memiliki informasi yang selalu di perbaharui dalam memenuhi kebutuhan wisatawan. Sesuai pedoman UNWTO (2021), informasi

wisata yang transparan dan mudah diakses meningkatkan pengalaman pengunjung dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, integrasi sistem informasi terpadu (misalnya portal web resmi kabupaten) diperlukan agar wisatawan dan penduduk setempat dapat berkolaborasi mengelola destinasi berkelanjutan, mendukung SDG 8 (ekonomi inklusif) dan SDG 9.

Pada indikator ketiga yakni dari aspek lingkungan, Pulau Dua memiliki ekosistem laut yang sangat kaya. Observasi lapangan menunjukkan terumbu karang yang masih sehat dan keanekaragaman hayati bawah laut tinggi. Pulau Dua bahkan masuk kawasan *Coral Triangle* yang terkenal akan biodiversitas lautnya, sehingga menjaga keseimbangan ekosistem sangat penting. Keindahan alam bawah laut ini menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik dan mancanegara, namun juga rentan terhadap dampak pariwisata dan sampah laut. Oleh karena itu, prinsip SDG 14 menuntut pengembangan wisata yang mengutamakan pelestarian ekosistem laut. Misalnya, pengelola dan masyarakat lokal harus menerapkan tata kelola konservasi, seperti patroli penangkapan ikan ilegal dan rehabilitasi terumbu karang.

Data lapangan mengungkapkan masalah serius pada pengelolaan sampah. Wawancara menyatakan fasilitas kebersihan di Pulau Dua masih minim:

“kebersihan di Pulau Dua perlu ditingkatkan, perlu disiapkan tempat sampah, karena sejauh ini saya melihat masih banyak sampah yang berserakan mba, jadi mengganggu keindahan pulaunya juga”.

Foto dokumentasi menunjukkan banyak sampah menumpuk di pantai dan jalur wisata. Bapak Kades (Kepala Desa) mengonfirmasi belum adanya program pengolahan sampah:

“Kami belum memanfaatkan limbah untuk diolah menjadi produk yang menghasilkan, sampah plastik langsung diangkut, kalau untuk pengolahan hanya satu orang pengrajin yang membuat dari batok kelapa”.

Berdasarkan hal tersebut, volume sampah plastik dan organik di Pulau Dua masih dibuang atau dibakar tanpa pemilahan. Kondisi ini kontras dengan praktik terbaik pariwisata berkelanjutan. Torres-Delgado & Saarinen (2014) menegaskan bahwa fasilitas wisata harus mendukung kebutuhan pengunjung tanpa merusak sumber daya lingkungan. Dalam kerangka SDG 12 dan 14, destinasi wisata perlu membangun sistem pengelolaan limbah. Studi global menunjukkan manajemen sanitasi dan limbah sangat krusial bagi keberlanjutan destinasi, berdampak langsung pada citra dan kepuasan wisatawan. Saat ini Pulau Dua belum memiliki tempat

sampah terpilah atau instalasi pengolahan air limbah. Sejumlah peneliti (Mustaqim et al., 2020) menyebutkan bahwa tanpa pemilahan sampah dan fasilitas pengolahan, destinasi laut menghadapi ancaman pencemaran laut dan kehilangan daya tarik. Dengan kata lain, kegagalan pengelolaan sampah Pulau Dua memperlemah pencapaian SDG 12 (konsumsi/produksi bertanggung jawab) dan SDG 14.

Singkatnya, meskipun daya dukung ekosistem laut Pulau Dua masih baik, lemahnya pengelolaan sampah menjadi isu kritis. Tindakan mitigasi yang diperlukan meliputi penyediaan tempat sampah terpisah, edukasi ‘bersih-bersih’ bagi penduduk dan wisatawan, serta pelatihan pengelolaan limbah menjadi produk bernilai ekonomi misalnya kerajinan dari limbah laut atau organik. Bimbingan bersama pengelola dan komunitas lokal juga sudah diinisiasi, namun perlu dukungan lebih luas agar prinsip konservasi dan penanganan sampah diterapkan menyeluruh. Rekomendasi ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan pariwisata: mengutamakan keseimbangan ekologi sambil memberikan manfaat ekonomi dan sosial (UNWTO dan GSTC).



Gambar 2. 16 Tujuan 12 dan 14 Sustainable Development Goals
Sumber: <https://www.sdgs.bappenas.go.id>

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, diperoleh hasil terkait konfirmasi pada penilaian indikator konsep Pariwisata Berkelanjutan di wisata bahari Pulau Dua Kabupaten Banggai dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals*. Untuk mempermudah dalam memahami hasilnya, dikelompokan berdasarkan terlaksana atau tidak sesuai tabel dibawah ini:

Tabel 2. 8 Aspek dan Indikator Pariwisata Berkelanjutan dalam Mencapai *Sustainable Development Goals*

Aspek <i>Keberlanjutan</i>	Indikator Pariwisata Berkelanjutan	Keterangan	Tujuan <i>Sustainable Development Goals</i>

Ekonomi	Menggunakan bahan dan di produksi dari lokal	Tahap Pengupayahan	1 Tanpa kemiskinan dan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
	Keterlibatan Masyarakat lokal	Tahap Pengupayahan	
	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Tahap Pengupayahan	
Sosial	Terciptanya program kemitraan di dalam masyarakat	Terlaksana	8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur dan 13 Penanganan Perubahan Iklim
	Partisipasi dalam Kegiatan Budaya Lokal dan Kerjasama Komunitas	Terlaksana	
	Keikutsertaan Masyarakat dalam Pemeliharaan Infrastruktur	Tahap Pengupayahan	
	Ketersediaan Informasi	Terlaksana	
Lingkungan	Perlindungan lingkungan secara keseluruhan	Terlaksana	14 Ekosistem Kelautan, 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
	Pengolahan Sampah	Tahap Pengupayaan	

Sumber: Hasil olah data, 2025

2.7 Kesimpulan dan Saran

2.7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang di lakukan peneliti mengambil kesimpulan bahwa kondisi wisata bahari di Pulau Dua saat ini menunjukkan potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berkelanjutan. Namun, realisasi terhadap tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan fungsional.

1. Aspek Ekonomi

Wisata bahari di Pulau Dua memberikan peluang pengembangan ekonomi lokal melalui pemanfaatan bahan dan produk yang diproduksi masyarakat, khususnya hasil laut dan kuliner khas. Namun, keterlibatan masyarakat

dalam aktivitas pariwisata masih terbatas, sehingga dampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan penurunan angka pengangguran belum optimal. Kondisi ini menegaskan bahwa kontribusi terhadap SDGs 1 Tanpa Kemiskinan dan SDGs 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi) sudah mulai terlihat, tetapi masih perlu penguatan melalui program pemberdayaan masyarakat, pelatihan keterampilan, serta dukungan kelembagaan.

2. Aspek Sosial

Pulau Dua menunjukkan adanya bentuk kemitraan antara masyarakat, pengelola, dan lembaga pendukung yang berperan dalam menjaga keberlanjutan pariwisata. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya, pemeliharaan infrastruktur, serta kepemilikan akomodasi berbasis komunitas mulai berkembang, walaupun belum merata. Ketersediaan informasi pariwisata juga masih terbatas, sehingga aksesibilitas informasi bagi wisatawan perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, aspek sosial Pulau Dua berkontribusi pada SDGs 9 (industri, inovasi, dan infrastruktur) serta SDGs 13 (penanganan perubahan iklim), dengan catatan penguatan pada aspek partisipasi budaya dan pengelolaan informasi.

3. Aspek Lingkungan

Ekosistem bahari Pulau Dua relatif masih terjaga, dengan keindahan terumbu karang dan keanekaragaman hayati yang menjadi daya tarik utama wisata. Namun, persoalan serius terdapat pada pengelolaan sampah dan limbah, yang belum ditangani dengan sistematis. Kondisi ini berimplikasi terhadap pencapaian SDGs 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab) dan SDGs 14 (ekosistem laut). Upaya perlindungan lingkungan telah dimulai melalui program sosialisasi dan konservasi, tetapi implementasi di lapangan masih terbatas dan membutuhkan dukungan kebijakan serta kesadaran kolektif dari seluruh pemangku kepentingan.

Secara umum, kondisi wisata bahari Pulau Dua telah memperlihatkan arah yang mendukung pariwisata berkelanjutan sesuai indikator SDGs. Namun, realisasi penuh dari tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan membutuhkan langkah strategis yang lebih kuat, khususnya pada aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, penguatan kelembagaan, pelestarian budaya, serta pengelolaan sampah dan lingkungan. Dengan perbaikan pada aspek-aspek tersebut, Pulau Dua berpotensi menjadi

destinasi wisata bahari berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan laut dan sosial-budaya setempat.

2.7.2 Saran

Secara keseluruhan, wisata pulau dua memiliki potensi yang sangat besar. Namun, keberhasilan pengembangannya saat ini bergantung pada perencanaan yang matang dan fokus dalam pemeliharaan aset yang dibangun. Prioritaskan pembangunan infrastruktur jalan, dermaga yang memadai, akomodasi yang ramah lingkungan, ketersediaan air bersih dan listrik di pulauanya, sehingga wisatawan yang berkunjung bisa menikmati keindahan pulau dua dengan nyaman. Tentunya dibutuhkan Kerjasama yang baik antara pihak pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat lokal untuk komitmen dalam menjaga kelestarian wisata pulau dua kabupaten banggai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, I., Krishnadianty, D., Syukur, A. G., & Dian, I. A. (2016). *Best Environmental Equitable Practices (BEEP): Panduan pengembangan akomodasi wisata ramah lingkungan*. https://www.wwf.id/sites/default/files/2025-04/buku_beeps_akomodasi_rev_5.pdf
- Augustinah, F., & Pramudiana, I. D. (2018). Dampak Obyek Wisata Wbl Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan. *Praja Lamongan*, 1(1), 35–45.
- Arasy, M. A., Trisutomo, S., & Ekawati, S. A. (2019). Perencanaan Kawasan Pariwisata Pantai yang Berkelanjutan (Studi Kasus: Pantai Gusunga, Kabupaten Takalar). *Jurnal Wilayah & Kota Maritim ...*, 7(6), 35–46. <https://cot.unhas.ac.id/journals/index.php/jwkm/article/view/1338%0Ahttps://cot.unhas.ac.id/journals/index.php/jwkm/article/download/1338/946>
- Bahar, A. M., Maizaldi, M., Putera, N., Widiesty, R., Chaniago, S., & Eliza, Y. (2020). The Effect of Tourism Facilities, Service Quality and Promotion of Tourist Satisfaction in South Pesisir District. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 5(1), 5. <https://doi.org/10.33087/jmas.v5i1.141>
- Bakogiannis, E., Potsiou, C., Apostolopoulos, K., & Kyriakidis, C. (2021). Crowdsourced Geospatial Infrastructure for Coastal Management, Tourism & Hospitality.
- Bappenas. (2017). *Voluntary National Review (VNR): Eradicating poverty and promoting prosperity in a changing world*. xix, 138. <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15705Indonesia.pdf>
- Bello, A., Jibir, A., & Ahmed, I. (2018). Impact of small and medium scale enterprises on economic growth: evidence from Nigeria. *Global Journal of Economics and Business*, 4(2), 236–244.
- Burns, P.M. and A. Holden. 1997. Alternative and Sustainable Tourism Development The Way Forward. In: France, L. (Ed). *The Earthscan Reader in Sustainable Tourism*. Earthscan. London
- Costa, L. L., Bulhões, E. M. R., Caetano, J. P. A., Arueira, V. F., de Almeida, D. T., Vieira, T. B., Cardoso, L. J. T., & Zalmon, I. R. (2023). Do coastal erosion and urban development threaten loggerhead sea turtle nesting? Implications for sandy beach management. *Frontiers in Marine Science*, 10(October), 1–9. <https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1242903>
- Dodds, R., & Holmes, M. R. (2022). Who Walks the Walk and Talks the Talk? Understanding What Influences Sustainability Behaviour in Business and Leisure Travellers. *Sustainability (Switzerland)*, 14(2). <https://doi.org/10.3390/su14020883>
- Evita, Rossi, I. Nyoman Sirtha, and I. Nyoman Sunartha. 2015. “DAMPAK PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN SARANA AKOMODASI WISATA TERHADAP PARIWISATA BERKELANJUTAN DI BALI : Rossi Evita, I Nyoman Sirtha, I Nyoman Sunartha.” *Program Pascasarjana Universitas Udayana, Bali* 2(1):1–12.
- Hastuti, A., Anam, C., & Dkk. (2022). *Tujuan pembangunan berkelanjutan indonesia 2022*. Jakarta: BPS RI

- Hasriyanti, & Ansarullah. (2019). Karakteristik Kemiringan Lereng, Kedalaman Dan Kecerahan Dalam Mendukung Aktivitas Permandian Di Pantai Marumasa Kecamatan Bontobahasi Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Environmental Science*, 2(1), 99–109.
- Jamal, T., & Stronza, A. (2020). Collaboration Theory and Tourism Practice in Protected Areas: Critical Issues and Governance Frameworks. *Journal of Sustainable Tourism*, 28(10), 1587-1607.
- Jørgensen, C.M., & Mc Kercher, B. (2021). Managing Tourist Attractions for Sustainability. *Journal of Destination Marketing & Management*, 19, 100542.
- Journal of Tourism, Sustainability and Well-Being (2024). *Smart solutions for coastal tourism safety and crowd monitoring*.
- Kautsary, J. (2023). *Public Infrastructure Problem for Developing Tourism Destinations in Coastal And Small Islands Areas: Case Study Karimunjawa Archipelago*, ICCDA Conference Proceedings.
- Lane, B., & Kastenholz, E. (2015). Rural tourism: The evolution of practice and research approaches. *Journal of Sustainable Tourism*, 23(8–9), 1137–1156.
- Marpaung, H. (2002). *Pengetahuan Kepariwisataaan*. Alfabeta.
- Musaddun. (2013). BENTUK PENGEMBANGAN PARIWISATA PESISIR BERKELANJUTAN DI KABUPATEN PEKALONGAN Musaddun, Wakhidah Kurniawati, Santy Paulla Dewi dan Novia Sari Ristianti. *Jurnal Ruang*, 1(2), 261–270.
- Miswan, M., & Sukaesih, U. (2019). Analisis Destinasi Pariwisata Pulau Kelapa Dan Pulau Harapan Di Kepulauan Seribu Jakarta. *Jurnal Industri Pariwisata*, 2(1), 10–20.
- Mukti, R. (2020). Pemetaan Potensi Objek Wisata. *Scopus*, 6(2), 87–94.
- Pahleviannur, Muhammad Rizal, et al. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukoharjo: Pradina Pustaka.
- Pratami, M., Harianja, R., & Agung Sadewo, W. (2021). Persebaran Objek Wisata Dengan Sistem Informasi Geografi (SIG) Kabupaten Lampung Barat. *Journal of Science, Technology, and Virtual Science*, 1(2), 118–123.
- Putra, A.E., Y. (2018). "Analisis daya minat pengunjung terhadap wisata alam air terjun denalo maras". *Jurnal Organisasi Dan Manajemen Faperta*, 5(1), 1–10.
- Rahmayani, I. I. S., Ningrum, S., & Sukarno, D. (2021). Indikator Perencanaan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. In *Jurnal Administrasi Negara* (Vol. 12, Issue 2).
- Rijal, Dr. Syamsu, et al. (2023). *Kebijakan Pengembangan Wisata Bahari Berbasis Blue Economy di Provinsi Sulawesi Selatan*.
- Robo, S., Ainun Tangge, N., & Aji, K. (2023). Pemetaan Destinasi Wisata Di Pulau Ternate Dengan Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Lingkungan Almuslim*, 2(2), 001–008. <https://doi.org/10.51179/jla.v2i2.2044>
- Robinson, T. K., Kiyai, B., & Mambo, R. (2019). Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(84), 70–82.
- Scheyvens, R., & Biddulph, R. (2018). Inclusive Tourism Development. *Tourism Geographies*, 20(4), 589–609.
- Suhardono, E., Wahyudi, A., & Musleh, M. (2023). Analisis Pengembangan Ekowisata Bahari Dengan Pendekatan Soft System Method Di Desa Gisik Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(3), 1241–1252.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

- Torres-Delgado, A., & Saarinen, J. (2014). Using indicators to assess sustainable tourism development: A review. *Tourism Geographies*, 16(1), 31–47.
- UNDP. (2017). Tourism and the Sustainable Development Goals – Journey to 2030. In *Tourism and the Sustainable Development Goals – Journey to 2030*. <https://doi.org/10.18111/9789284419401>
- UNWTO (2021). *Tourism and the Sustainable Development Goals – Journey to 2030*.
- Wekke, I. S. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri.
- World Travel & Tourism Council. (2024). *Economic Impact Research (EIR)*.